

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia pada masa orde baru dalam 32 tahun kepemimpinan Soeharto banyak dinamika politik yang terjadi. Rezim Soeharto dapat bertahan selama waktu tersebut akibat strategi politik yang kuat. Indonesia pada orde baru mengakui bahwa demokrasi ialah salah satu sistem pemerintahan, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak, melainkan otoriter. Orde baru merupakan makna pembeda dari periode sebelumnya yakni orde lama. Tidak ada yang berbeda dengan masa sebelumnya, bahkan cenderung meneruskan gaya orde lama. Modifikasi memang dilakukan, misalnya dalam pemaknaan kata “revolusi” diganti dengan “Pembangunan”, sedangkan “kepribadian bangsa” ditukar dengan “jati diri bangsa”, sebab pada masa orde lama kata-kata tersebut tabu untuk diucapkan. Bahkan, sikap otoriter Soekarno mirip dengan Soeharto, menurut pandangan penulis. Ketika masa orde lama dan orde baru berkuasa, semua kekuatan politik dan golongan berada pada kekuatan pemimpin, sehingga memengaruhi demokrasi di Indonesia<sup>1</sup>. Dengan demikian, orde baru merupakan kepanjangan perjalanan orde lama. Meskipun keberlanjutannya penuh intrik dan trik dalam melanggengkan kekuasaan, masa orde baru lebih ekstrim dibandingkan dengan orde lama.

Soeharto sebelum menjabat sebagai presiden Indonesia tahun 1967 sampai 1998 menggantikan presiden pertama di Indonesia yakni Soekarno, beliau adalah seorang presiden militer pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dengan

---

<sup>1</sup> Susanto Zuhdi. 2009. *Resensi Buku : McGlynn, John H. et al. (red.), Indonesia in the Soeharto years; Issues, incidents and images. Jakarta: Lontar Foundation, 2007, xxiii + 483 hlm. ISBN 979-808357-1. Price: EUR 49,90 (hard cover). Wacana, Vol. 11 No. 1 (April 2009).*

pangkat terakhir Mayor Jenderal. Kemudian, sebelum ia mendapatkan kursi kekuasaannya, beliau menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat yang dilantik pada 16 Oktober 1965, pasca kejadian G-30S/PKI. Karir Soeharto pun sebelum menjadi menteri tidak pernah lepas dari karir militer. Perjalanan karir militer Soeharto berdampak pada cara kepemimpinan beliau selama menjadi presiden Republik Indonesia. Selama Presiden Soeharto menjabat khususnya di masa Orde Baru beliau telah melakukan berbagai kebijakan agar terciptanya keamanan nasional di Indonesia.

Menurut beberapa literatur yang penulis baca, penulis menyimpulkan bahwa pengertian keamanan nasional secara general merupakan kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu negara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer dalam menghadapi pelbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kepentingan nasional menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu negara. Kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi disebut juga dengan keamanan nasional. Konsep tersebut menekankan pada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dalam negara itu<sup>2</sup>.

Langkah-langkah penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup diplomasi dan mengatasi ancaman, kekuatan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil, serta kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat termasuk terorisme. Oleh sebab itu, negara harus memastikan

---

<sup>2</sup>Darmono, Bambang dkk. 2010. Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia. Jakarta : Sekertaris Jenderal Ketahanan Nasional, hal. 9

kemampuan daya dukung dan tersedia infrastruktur vital di dalam negeri, kekuatan intelijen untuk mendeteksi atau menghindari berbagai ancaman dan *spionase*, melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk proteksi kenegaraan. Semua itu menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi untuk negara<sup>3</sup>.

Politik pemerintahan pada masa orde baru sangat kental dengan militer. Militer pada pada masa kepemimpinan Soeharto dapat menguasai dan mengatur pemerintahan. Sejak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dikenal dengan ABRI sebagai militer TNI pada masa itu sangat menentukan tahun 1966, sepanjang perkembangannya mengalami dinamika yang sangat tinggi. Sejak waktu itu peran politik yang didapatkan ABRI, baik dalam institusional atau personal semakin besar dan semakin berat, maka profesionalisme ABRI semakin menurun dengan semakin naiknya peran politiknya. Seluruh aparat dari personil ABRI lebih sibuk dan lebih fokus pada kegiatan sosial, politik, ekonomi<sup>4</sup>. Sehingga, campur tangan militer dalam pemerintahan pada masa itu dapat menentukan langkah kebijakan pemerintah, sebab dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling atas, militer dapat mengatur tata kelola pemerintah.

Pada masa kepemimpinan Soeharto banyak sekali peristiwa yang merenggut hak asasi manusia. Berikut penulis sebutkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ada pada saat Soeharto menjabat sebagai presiden di Indonesia<sup>5</sup> :

---

<sup>3</sup> *Op.cit.*, hal 10

<sup>4</sup> Yahya A. Muhaimin. 2005. Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia Tahun 1945 – 1966 (Kata Pengantar 2002). Yogyakarta : UGM Press, hal. xl.

<sup>5</sup> Dini Hardianti, Rahayu, dan Joko Setiyono. 2016. Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu Melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia. Jurnal : DIPONEGORO LAW JOURNAL, Vol.5 Nomor 3 tahun 2016.

Tabel 1.1 Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM di Indonesia

No.	Kasus	Latar Belakang	Penanganan
1.	G-30S PKI	Terbunuhnya perwira-perwira tinggi angkatan darat yang dilakukan oleh PKI.	Melakukan penumpasan semua anggota PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI dilakukan di berbagai daerah Indonesia.
2.	Kasus Penembakan Misterius (Petrus) tahun 1982 sampai dengan 1985	Permintaan Soeharto kepada Polisi dan ABRI untuk melakukan pemberantasan yang efektif menekan angka kriminalitas.	Terjadinya pembunuhan diluar proses hukum terhadap para preman yang diduga meresahkan masyarakat.
3.	Kasus Talangsari Lampung pada tahun 1989	Warsidi (tokoh senior) yang merupakan pimpinan komunitas muslim di Talangsari, menentang pemerintahan orde baru yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat.	Aparat melakukan penyerangan dengan mengepung lokasi jamaah Warsidi dan melakukan penembakan setelah pengepungan.
4.	Tragedi Penghilangan Aktivis Secara Paksa tahun 1997-1998	Para aktivis muda ingin menegakan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan orde baru dengan mengkritisi kebijakan pemerintah.	Penculikan dilakukan oleh aparat terhadap aktivis yang dibawa paksa dari rumahnya dan dianiaya.
5.	Tragedi Trisakti Semanggi I dan II pada tahun 1998	Protes masyarakat dan mahasiswa menuntut turunnya Soeharto yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang semakin memburuk.	Tindakan penyerangan yang dilakukan dengan tembakan dan pelemparan gas air mata terhadap mahasiswa dan beberapa tindakan lainnya.
6.	Kasus Kerusuhan Mei 1998	Peristiwa penembakan terhadap aktivis mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 serta masalah ekonomi yang mengkritik pemerintah.	Penyerangan terhadap etnis Tionghoa (minoritas) dengan membakar pertokoan dengan tindakan lainnya serta melakukan pemerkosaan terhadap wanita etnis Tionghoa.

Sumber: *Diponegoro Law Journal*. Vol 5, Nomor 3, Tahun 2016

Pada tabel diatas dapat dipahami bahwa kekuatan rezim Soeharto dilakukan dengan kekerasan. *Hard power* yang dilakukan Soeharto dianggap tidak berperikemanusiaan. Penulis tertarik pada kasus penembakan misterius (Petrus) tahun 1982 sampai dengan 1985.

Pada 6 April 1985 Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta Letkol. M. Hasby memberikan himbauan terhadap pengusaha dan masyarakat agar tidak lagi memberikan setoran kepada pemeras yakni preman-preman “gali” (gerakan anak liar) dengan cara menembak ditempat secara misterius, kejadian itu dilakukan oleh aparat, karena sering kali meresahkan masyarakat, para gali berjatuhan satu persatu meninggal dunia<sup>6</sup>. Kondisi korban petrus ditandai dengan tidak adanya identitas dalam keadaan tidak bernyawa dengan kedua tangan terikat di belakang, mayat ditemukan dengan tiga luka tembakan di kepala atau mati karena bekas tercekik. Selain itu, biasanya di atas tubuh mayat diletakkan uang Rp 10 ribu untuk biaya penguburan mayat<sup>7</sup>.

Kejadian penembakan misterius atau petrus menurut Ketua Tim AdHoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yosep Adi Prasetyo mengatakan jumlah korban dari peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 mencapai 10 ribu orang<sup>8</sup>. Jumlah tersebut termasuk korban meninggal dunia dan hilang. Kasus pelanggaran HAM tersebut menurut *David Bouchier*<sup>9</sup> pelaku pembunuhan bertindak dalam konteks melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi

---

<sup>6</sup> Nurkhoiron, Muhammad. 2011. Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan HAM Berat (Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985). KOMNAS HAM RI: Jakarta. Hal. 55

<sup>7</sup> Tempo.co. Selasa, 24 Juli 2012 16:35 WIB. *Korban `Petrus` 1982-1985 Capai 10 Ribu Orang.* (Online) <https://nasional.tempo.co/read/419026/korban-petrus-1982-1985-capai-10-ribu-orang>, diakses 14 Februari 2019 pukul 07 : 24 WIB.

<sup>8</sup>Tempo, Ibid.

<sup>9</sup> *David Bouchier*. 1990. *CRIME, LAW AND STATE AUTHORITY IN INDONESIA. Law, Crime and State Authority in Indonesia" in Arief Budiman (ed) State and Civil Society in Indonesia, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria 1990 pp.177-212.*

Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Republik Indonesia, yang juga berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Selain pelaku yang memiliki kewenangan, ditemukan pula bukti adanya pelaku individu yang bertindak secara aktif dan disebut sebagai "operator". Bukti tersebut diperkuat dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, misalnya pada tali tambang dan kayu yang digunakan untuk mencekik korban. Menurut Yosep, alat untuk eksekusi tampak sudah dipersiapkan sebelumnya. Kayu pegangan dipotong dengan halus, bahkan diserut. Sedangkan jenis ikatan *clove-hitch* pada talinya menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang terlatih dan mengerti tali-temali<sup>10</sup>.

Kejadian sadis tersebut menurut *David* pada penelitiannya yang sama terjadi akibat melemahnya perekomonian di Indonesia tahun 1980 yang mengakibatkan tingkat kriminalitas yang tinggi, "*most of the blame for this upsurge in violent crime fell on the shoulders of young urban criminals known, in Java at least, as gali, allegedly an acronym for gabungan anak-anak liar (literally: gangs of wild children)*<sup>11</sup>". Saat itu, masyarakat selalu diresahkan oleh perilaku gali atau bisa juga disebut dengan *gangster*. Perilaku mereka yang bertindak kriminal dengan melakukan pencurian, penjarahan, pemerasan, pemerkosaan, dan lain-lain. Kondisi stabilitas keamanan masyarakat terancam, karena ulah mereka yang meresahkan.

Kejadian penembakan misterius membuat suasana di berbagai daerah Indonesia mencekam. Setiap kejadian penembakan suara-suara tembakan dan penganiayaan terdengar sangat dekat oleh masyarakat. Korban yang meninggal

---

<sup>10</sup> Tempo.co, *loc.cit.*

<sup>11</sup> David, *loc.cit hal.180.*

dunia, mayatnya tergeletak ditempat yang mudah ditemukan warga. Surat kabar online memberitakan mereka diburu oleh tim Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) yang kemudian dikenal sebagai penembak misterius (Petrus). Ketika melakukan aksinya, suara letusan senjata api para penembak misterius terdengar oleh masyarakat dengan jelas sehingga suasana tambah mencekam<sup>12</sup>. Masyarakat merasa takut akibat adanya kejadian tersebut. Meskipun, masyarakat tahu eksekutor yang melakukan penembakan tersebut ialah ABRI, namun saat itu tidak ada masyarakat yang berani mengungkap. Media masa hanya bercerita dengan *headline* peristiwa penembakan tersebut, tanpa berani mengungkap fakta kejadian lebih detail.

Kriminalitas berlatarbelakang pembantaian terhadap preman ini sebagai upaya membrantas pembuat onar yang dapat mengancam ketenangan pada masa itu. Meskipun negara mengelak terlibat dalam kejadian tersebut. Namun pada akhirnya ada sebuah pengakuan, seperti yang diungkapkan *James T. Siegel* dalam bukunya yang berjudul *Penjahat Gaya (Orde) Baru* yang diterjemahkan dari buku *A New Criminal Type in Jakarta Counter-Revolution Today*, ia dengan berani menulis bahwa pelaku kejadian petrus terjadi sudah sejak lama dan bukan menjadi rahasia lagi. Pemerintah, meskipun pada mulanya membantah terlibat, segera mengakui sebagai pelakunya. Para korban pembunuhan berasal dari geng liar kelas teri yang bekerja bagi partai pemerintah, Golkar, dalam pemilu satu tahun sebelumnya, kemudian dicampakkan ke kehidupan mereka semula<sup>13</sup>. Kejadian tersebut terjadi bukan dengan maksud yang sengaja, pemerintah terutama

---

<sup>12</sup> Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Tak Ada Ampun di Jaman Petrus, Para Bandit Bertumbuhan di Jalanan, <http://bangka.tribunnews.com/2018/02/03/tak-ada-ampun-di-jaman-petrus-para-bandit-bertumbuhan-di-jalanan>.

<sup>13</sup> *James T. Siegel*. 2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*. Yogyakarta : LkiS. Hal, 152.

Soeharto pada saat itu beralih bahwa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk dari perlindungan negara terhadap rakyatnya, gali dianggap sebagai perusuh, pembunuh, dan pemberontak yang membuat masyarakat resah.

Tindakan Soeharto tersebut berdasarkan atas pandangan bahwa gali sebagai kebangkitan kekejaman yang tidak manusiawi yang menimbulkan ketakutan yang meluas dan berpotensi destabilisasi. *James* juga menulis kutipan dari buku otobiografi Soeharto edisi pertama, namun pada edisi berikutnya dihapus<sup>14</sup> :

“Masalah yang sebenarnya adalah bahwa kejadian itu didahului oleh ketakutan yang dirasakan oleh rakyat. Ancaman itu datang dari orang-orang jahat, perampok, pembunuh, dan sebagainya. Ketentraman terganggu. Seolah-olah ketentraman di negeri ini sudah tidak ada. Yang ada seolah-olah hanya rasa takut saja. Orang-orang jahat itu sudah bertindak melebihi batas prikemanusiaan. Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Umpamanya saja, orang tua sudah dirampas pelbagai miliknya, kemudian masih dibunuh. Itu ‘*kan* sudah diluar kemanusiaan. Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh. Kemudian ada perempuan yang diambil kekayaannya dan si istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu, di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan! Apa hal itu masih mau didiamkan saja?”

Adanya berbagai kejahatan yang terjadi bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi membuat rezim Soeharto merasa ketakutan. Karena gali berasal dari sekumpulan preman yang dapat melakukan apapun dengan kejam, hal itu mengancam stabilitas pemerintahan. Sehingga, dengan rentetan ancaman yang terjadi memaksa pemerintah untuk bertindak tegas meskipun pada akhirnya hal tersebut juga melanggar kemanusiaan. J. Kristiadi menuliskan bahwa negara dapat menjadi ancaman yang mengerikan dan menakutkan bagi warganya. Hal tersebut untuk mempertahankan keamanan nasional sebagai upaya suatu bangsa untuk

---

<sup>14</sup> *Siegel, ibid.* Hal, 155-156.



mempertahankan eksistensi, kelangsungan hidup suatu bangsa yang tidak jarang harus mengorbankan hak-hak politik atau kebebasan pribadi warga negara demi terwujudnya rasa aman<sup>15</sup>. Dengan demikian atas dasar keamanan nasional kejadian petrus dapat terjadi.

Kebijakan Soeharto pada masa orde baru dalam mengendalikan stabilitas keamanan nasional yang dinilai terlalu otoriter dengan adanya peristiwa Petrus. Tentunya menjadi suatu fokus penelitian penulis mengenai kasus Penembakan Misterius pada masa 1982-1985 bisa terjadi dan menariknya ialah strategi rezim orde baru terkait politik keamanan pada masa itu. Kejadian tersebut meninggalkan sejarah kelam yang harus dikenang bangsa Indonesia. Kejadian itu juga belum dapat terungkap hingga saat ini dimana Indonesia telah mempunyai sistem demokrasi yang lebih maju dibandingkan pada saat rezim Soeharto masih berkuasa.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah pada kasus tersebut, rumusan masalah yang dapat ditarik untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi orde baru terkait politik keamanan pada masa 1982-1985?
2. Mengapa kasus petrus belum dapat terungkap hingga saat ini?
3. Bagaimana kasus penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982 – 1985 terjadi?

---

<sup>15</sup> J. Kristiadi. 2006. Presfektip Baru Keamanan Nasional Editor Bantarto Bandoro. Centre For Strategic and International Studies. Hal, 15.

### **C. Pembatasan Masalah**

Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa kepemimpinan Orde Baru, sebab pada kenyataannya pemerintahan orde baru menerapkan *hard power* untuk menyelesaikan setiap problematika dinamika politik yang terjadi demi untuk mempertahankan kekuasaan. Cara militeristik merupakan karakter orde baru saat itu. Jika diruntut dari awal hingga akhir, maka politik militer Soeharto sangat kompleks.

Oleh sebab itu, penulis hanya akan fokus pada pengamatan perihal kasus penembakan misterius (petrus) pada periode waktu tahun 1982 sampai dengan 1985. Kemudian, pembatasan masalah pun hanya perihal kejadian-kejadian yang melanggar HAM tersebut. Kasus petrus yang melibatkan banyak nyawa meninggal dan jiwa yang hilang sebuah cara untuk mempertahankan kekuasaan. Rekapenulis kasus akan menjadi salah satu pembahasan pada penelitian ini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan menjadi indikator pengamatan, tujuan-tujuan tersebut ialah pertama, penelitian ini untuk mengungkap bagaimana strategi orde baru terkait politik keamanan pada masa 1982-1985. Tujuan ini penting dicapai supaya memahami apa yang dilakukan negara terhadap kasus petrus yang terjadi, dan upaya tersebut diharapkan mampu mengungkap mengapa kejadian petrus ini kasusnya tidak dapat diungkap secara lebih dalam dan hanya menyisakan sejarah yang harus dikenang bangsa Indonesia.

Kemudian, untuk menjelaskan kronologis bagaimana kasus penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982 – 1985 terjadi. Tujuan ini dicapai agar dapat

diketahui permasalahan yang belum diungkap dengan ilmiah, melalui teori-teori yang diungkapkan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis kajian ini memuat banyak pengetahuan perihal politik keamanan masa orde baru (studi kasus tentang gerakan penembakan misterius tahun 1982-1985). Pada peneliti dapat mengkaji lanjutan penelitian yang penulis buat ini untuk digunakan dalam mengungkap fakta yang terjadi.

### **2. Secara Praktis**

Manfaatnya adalah meningkatkan kreativitas dalam membahas dan menyusun karya ilmiah. Serta dapat mengetahui fakta peristiwa gerakan penembakan misterius yang terjadi pada masa orde baru tahun 1982-1985. Bahwa peran militer sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Keamanan Nasional**

Salah satu fungsi dasar yang harus diperankan oleh negara dalam melindungi kedaulatannya dan memberikan jaminan rasa aman terhadap warga negara dari berbagai bentuk ancaman disebut sebagai keamanan nasional<sup>16</sup>. Keamanan nasional memiliki beberapa nilai inti yang bersifat adaptif terhadap lingkungan internal dan eksternal suatu negara.

Nilai inti pertama secara internal akan berdampak pada proses perumusan konsep keamanan nasional untuk reorganisasi dalam berbagai sektor sebuah negara. Pelaku dalam sektor keamanan tersebut ialah aktor yang paling berperan. Terdapat sebuah kebutuhan dasar untuk mendorong profesionalisasi aktor-aktor keamanan di Indonesia, antara lain dengan menyempurnakan berbagai regulasi tentang peran, fungsi, posisi, wewenang, dan aspek-aspek lain yang bersangkutan.

Kedua, nilai inti dari konsep keamanan nasional secara eksternal merupakan bentuk ancaman global multidimensional yang memaksa negara untuk memiliki strategi keamanan nasional yang fleksibel dan mudah beradaptasi. Karakter tersebut juga menekankan pentingnya penyesuaian strategi dan pendekatan terhadap isu keamanan nasional secara lebih konperhensif dan multidisipliner.

---

<sup>16</sup> Dwi Ardhanariswari. 2008. Sistem Keamanan Nasional Indonesia. CV Dunia Printing Selaras. Hal, 2.

Pelaksanaan fungsi keamanan nasional menurut ahli secara teoritik dapat penulis simpulkan dalam bidang dan kegiatan yang lebih spesifik. Salah satu metodenya ialah dengan membedakan fungsi-fungsi melalui tahapan atau sekuens kegiatan. Tindakan-tindakan antisipatif, reaktif, aktif atau proaktif untuk menghadapi ancaman secara konvensional atau non-konvensional yang berasal dari ancaman tradisional maupun non-tradisional yang dapat menimbulkan konsekuensi fisik (militer, bersenjata, menderita) terhadap referensi objek (keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan warga negara) merupakan fungsi dari keamanan nasional<sup>17</sup>.

Apabila sebuah negara dalam situasi dan kondisi terancam, maka negara dapat mengambil sebuah keputusan politik. Tanggung jawab politik tersebut pada dasarnya mewajibkan adanya mekanisme koordinasi baik ditataran pengambilan kebijakan maupun operasional dalam pelaksanaan fungsi keamanan nasional. Adanya koordinasi tersebut menjadi sebuah alasan politik bahwa negara harus melaksanakan tatanan demokrasi. Sementara demokrasi menghendaki pelaksanaan negara yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, tidak terfokus pada satu kekuasaan tertentu. Biasanya pada sebuah kondisi saat demokrasi melemah, maka keamanan nasional akan menguat. Oleh sebab itu, aktor-aktor nasional harus tersebar dengan fungsinya masing-masing.

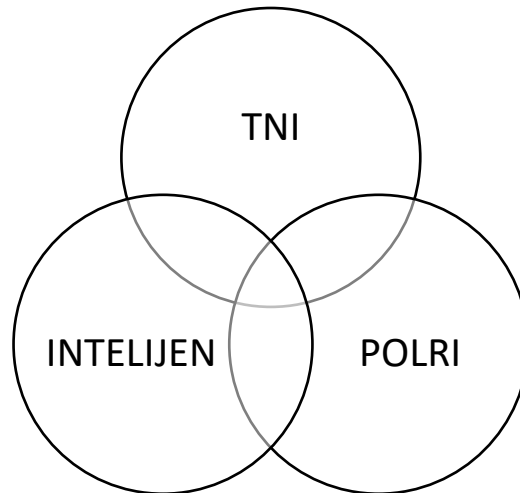
Aktor-aktor yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi keamanan nasional terdiri dari TNI, POLRI (ABRI) dan Intelijen. Ketiga aktor tersebut ialah sebagai penyelenggara pertahanan sebuah negara untuk melindungi warga negara dan seluruh aspek kenegaraan dari setiap ancaman yang berasal dari dalam atau

---

<sup>17</sup> Alexandra R Wulan, Kusnanto Anggoro dan Makmur Keliat, Ibid. Hal, 84-88.

luar negara. Berikut ilustrasi koordinasi yang seharusnya berjalan diantara aktor-aktor tersebut :

Gambar 2.1 Arsiran Kordinasi Keamanan Nasional



Pada ilustrasi diatas, nampak hubungan yang seharusnya ada dalam penyelenggaraan fungsi keamanan nasional. Pada bab pembahasan selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan fungsi keamanan nasional pada masa orde baru saat peristiwa petrus terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, kerangka konseptual keamanan nasional diungkapkan pada kajian pustaka ini agar menjadi kerangka analisis dalam menjelaskan setiap peristiwa yang terjadi agar menjadi ilmiah.

## 2. Teori Keamanan

Konsep keamanan (*Security*) berasal dari bahasa Latin “*secures*” (*secura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*Free from danger, free from fear*). Kata ini juga bisa di definisikan berdasarkan susunannya, yaitu gabungan kata “*se*” (yang berarti tanpa) dan “*curus*” yang berarti (rasa gelisah). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna “*liberation from uneasiness, or a*

*peaceful situation without any risk or threats*”. Dengan kata lain, di dalam makna keamanan (*secures*) terkandung arti terbebas dari segala macam ancaman, bebas dari rasa takut baik dari individu, kelompok, dan negara<sup>18</sup>.

Pada kajian ini penulis menggunakan teori keamanan sebab pada peristiwa Petrus latar belakang yang mendasari negara untuk bertindak adalah isu keamanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep keamanan dimaknai sebagai pembebasan dari rasa takut. Studi keamanan bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep dari isu yang berkembang. Peperangan, ancaman, atau globalisasi menjadi kerangka konseptual dalam memahami studi keamanan. Ada beberapa konsep yang menjadi kunci dalam studi keamanan<sup>19</sup>:

a. *Power*

*Power* merupakan suatu proses sosial yang memiliki dampak terhadap aktor yang memperoleh kontrol terhadap nasib orang lain, dimana konsep ini memiliki dua dimensi, sebagai intinya yang pertama adalah jenis hubungan sosial tersebut. *Power* bersumber dari kemampuan seseorang untuk mengatur orang lain, sebab dianggap sebagai aktor yang mampu melindungi atau mensejahterakan kehidupan sebuah negara. Pada tataran tradisional untuk mendefinisikan *power* digunakan ukuran dari kekuatan militer oleh sebuah negara.

Pendapat penulis sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh *Morgenthau*, *power* merupakan segala sesuatu yang dimiliki manusia untuk menentukan dan memelihara kontrol atau kekuasaan atas orang lain dan *power* meliputi seluruh hubungan sosial, mulai dari kekerasan psikologis yang tidak kentara melalui mana seseorang bisa mengontrol orang lain.

---

<sup>18</sup> Yanyan Mochamad Yani & Ian Montratama at all. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang, Intrans Publishing. hal. 13.

<sup>19</sup> *Yayan at all, Ibid.* hal. 13-21.

Kemudian menurut *Nye power* terbagi menjadi dua yaitu *Soft Power* dan *Hard Power*. *Soft Power* merupakan suatu kemampuan suatu pihak untuk mengarahkan pihak lain dan mengikuti kemauan pihak pertama tanpa tekanan. *Hard Power* di definisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu yang dikehendaki pihak pertama.

Ada tiga tipe *power* yang berdasarkan pada tindakan, nilai atau kebijakan yang diambil oleh negara. Tipe-tipe *power* ini menjadi sebuah acuan dalam menganalisis data yang diperoleh pada penelitian ini, adapun tiga tipe *power* tersebut ialah :

Tabel 2.1 Tipe-Tipe *Power* Menurut *Joseph. S. Nye. Jr*<sup>20</sup>

	<b>Tindakan</b>	<b>Instrumen Yang Digunakan</b>	<b>Kebijakan Yang Diambil</b>
<b><i>Hard Power</i></b>	Koersi Deterrence Perlindungan	Ancaman Kekuatan	Diplomasi Koersif Aliansi Perang
<b><i>Economic Power</i></b>	Bujukan Koersi	Pembayaran Sanksi	Bantuan Suap Sanksi
<b><i>Soft Power</i></b>	Ketertarikan Setingan	Nilai Kebudayaan Kebijakan Institusional	Diplomasi Publik Diplomasi Bilateral dan Multilateral

Konsep *power* ini diperkenalkan oleh *Joseph. S. Nye. Jr* seorang ilmuwan politik asal Amerika. Pada tahun 1977 dia menulis sebuah buku yang berjudul *Power and Interdependence* bersama rekannya *Keohane*. Melalui buku itu tipe-tipe *power* diungkapkan melalui konsep asimetris dan kompleksitas interdependensi. Ia juga mengungkapkan tentang *hard power* dan *soft power*, dan menjadi pioner atas dasar pemikiran dalam memecahkan masalah atau konflik kepentingan secara global dengan konsep *soft power* yang ia kemukakan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*



Pemikiran Nye tersebut memang saat itu dipengaruhi oleh kondisi negara-negara yang terlibat konflik. Oleh sebab itu, konsep *hard power* dan *soft power* yang ia kemukakan merupakan sebuah solusi untuk konflik saat itu. Konsep *hard power* identik dengan kekerasan, akan tetapi kemudian konsep itu mendapat kritikan, bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan kekerasan, sehingga muncul konsep *soft power*.

b. Ancaman

Menurut *Webster's International Dictionary*, ancaman adalah sebuah pernyataan atau ekspresi atau keinginan untuk menyakiti, menghancurkan, menghukum atau membalas. Secara umum, ancaman dapat diartikan sebagai sebuah masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar sistem.

Kemudian, untuk mengetahui tentang ancaman, maka dapat dibagi ke dalam beberapa dimensi yaitu berdasarkan dimensi lingkup, sifat, sumber, intensitas, dan historis. Adapun dimensi lingkup mencakup empat ancaman, yaitu ancaman militer, ancaman politik, ancaman ekonomi, dan ancaman ekologi. Dimensi sifat mencakup dua ancaman, yaitu ancaman langsung dan ancaman tak langsung. Dimensi sumber mencakup dua ancaman, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Dimensi intensitas dibagi lagi ke dalam sub dimensi jarak, waktu, dan kemungkinan.

Sub dimensi jarak mencapai tiga ancaman, yaitu ancaman yang jaraknya dekat, ancaman yang jaraknya menengah, dan ancaman yang jaraknya jauh. Sub dimensi waktu mencakup dua ancaman, yaitu ancaman yang ada dalam waktu pendek dan ancaman yang ada dalam waktu panjang. Sub dimensi intensitas mencakup ancaman yang telah terjadi, ancaman yang sedang terjadi, dan ancaman

yang terjadi. Terakhir, dimensi historis yang melihat ancaman dalam kerangka perkembangan zaman evolutif.

c. Kepentingan Nasional.

Konsep kepentingan nasional diperlukan dan penting untuk menjelaskan bagaimana perilaku negara dalam sistem internasional. Dalam hal ini kepentingan nasional menjadi *key concept* untuk perumusan kebijakan. Bagi kaum neorealis, kepentingan nasional merupakan upaya negara mencapai *power* untuk dapat mengembangkan dan memelihara kontrol negara terhadap aktor lain.

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui cara pemaksaan atau kerja sama. Karena itu, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik.

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh *Hans J. Morgenthau* dapat dirangkum dalam tiga bagian utama, yaitu: Pertama, Perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya. Kedua, perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim politik dan ekonomi; dan Ketiga, perlindungan terhadap kulturenya dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

d. Kekuatan Nasional

Kekuatan negara merupakan kapabilitas maupun kapasitas negara dalam memberikan pengaruh. *Power* didefinisikan oleh *Morgenthau* tidak hanya sebagai sasaran melainkan juga sebagai tujuan, misalnya untuk memperbesar *power*, suatu negara mempergunakan *power* yang telah dimilikinya untuk dapat mencapainya. *Power* juga dapat diartikan sempit sebagai *force*. Karena *power* tidak terbatas

pada kekuatan militer atau secara fisik saja (*hard power*), tetapi ancaman atau tekanan secara psikologis juga dapat dikatakan sebagai suatu *power*.

*Joseph Nye* menyebutkan bahwa salah satu pembentuk *national power* selain *hard power* adalah adanya *soft power* yaitu kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan apa yang di inginkan dengan mencitrakan sebuah ketertarikan daripada kekerasan atau harus membayar. Pencitraan ketertarikan ini berkaitan dengan kebudayaan negara, idealisme politik, dan kebijakan. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh negara mendapat legitimasi dari negara lain, berarti negara tersebut telah berhasil memberikan pengaruh dengan *softpower*.

*John Mearshimer* menyebutkan bahwa kapabilitas material yang dimiliki oleh negara terbagi menjadi dua yaitu *latent power* dan *military power* kedua bentuk *power* ini berasal dari aset-aset yang dimiliki negara. Adapun kedua penjelasan mengenai hal itu diantaranya :

#### 1) *Latent Power*

*Latent Power* merujuk pada kemampuan sosial-ekonomi negara yang ditujukan untuk membangun kekuatannya. Kemampuan sosial-ekonomi negara ini biasanya berupa kekayaan negara dan populasi di dalam negara. Populasi disini berperan penting karena negara yang kuat membutuhkan banyak tentara yang bias didirikan dari banyaknya populasi yang dimiliki. Selain itu, negara yang memiliki populasi yang besar juga berdampak pada ekonomi, dengan kemungkinan dapat memproduksi kekayaan bagi negara yang juga merupakan unsur penting dalam membangun kemampuan militer sebuah negara. Negara juga harus memiliki sumber ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militernya.

## 2) *Military Power*

Kekuatan militer adalah unsur penting dalam kekuatan negara. Kekuatan militer sebagian besar terbentuk dari besarnya ukuran dan kuatnya tentara negara dan kekuatan angkatan laut dan udara yang dimilikinya serta kemampuan nuklir yang dimiliki. Bahwa kekuatan persenjataan merupakan faktor material paling penting bagi negara dalam membentuk kekuatan.

### e. Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*)

Dalam sistem internasional anarki, masing-masing negara akan memosisikan negaranya agar tetap seimbang dengan negara-negara yang lain. Didalam teori ini negara di asumsikan sebagai aktor kesatuan, dimana negara akan melakukan pemeliharaan diri sendiri dalam hal melindungi negaranya atau negara tersebut akan mendominasi secara internasional. Negara akan melakukan usaha-usaha dalam mengimbangi kekuatan, usaha internal seperti meningkatkan kapabilitas ekonomi, meningkatkan kekuatan militer, dan membangun strategi yang cerdas serta usaha eksternal seperti meningkatkan dan memperluas aliansi atau melemahkan kekuatan lawan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, *balancing* merupakan strategi negara untuk meningkatkan kemampuan militernya dalam mengimbangi ancaman atau lawan. Dalam *balancing*, tidak ada tindakan untuk melawan ancaman atau lawan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika memasuki sebuah ranah aliansi, maka negara dapat melakukan *balance* yaitu menjadi oposisi dari sumber bahaya.

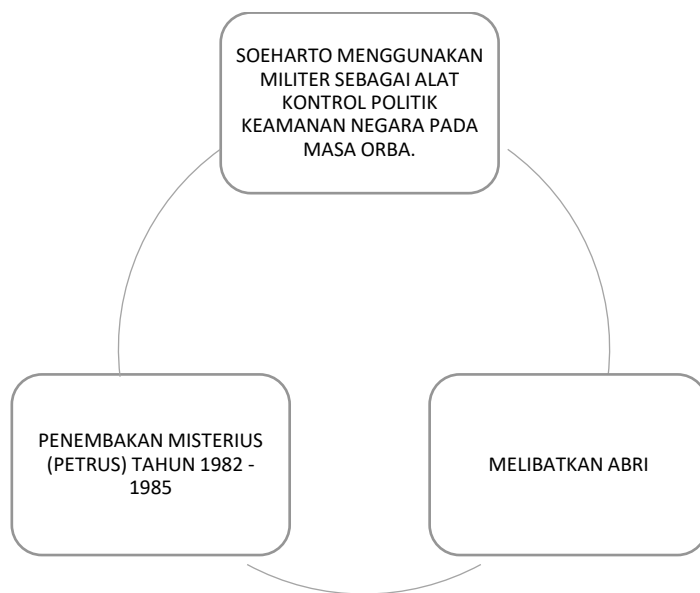
Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa *balancing* digerakkan oleh dorongan untuk menghindari kekalahan. Menurut *Walt*, ada dua alasan utama bagi negara untuk melakukan *balancing*, yaitu apabila negara gagal mengekang kekuatan

hegemoni sebelum menjadi kuat, maka sama saja negara tersebut membahayakan usaha mereka. Jika negara tidak melakukan *balancing* negara tersebut mempunyai resiko kegagalan untuk mengekang sebuah hegemoni yang potensial sebelum semakin menguat. Beraliansi dengan suatu kekuatan yang mendominasi berarti telah mendapatkan suatu kepercayaan dalam suatu kebaikan yang berkesinambungan. Strategi teraman yaitu bergabung dengan pihak yang tidak mudah mendominasi aliansi, untuk menghindar dari pihak yang mendominasi atau meningkatkan kapabilitas militernya.

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini merupakan deskripsi dari konsepsi politik keamanan masa orde baru (studi kasus tentang gerakan penembakan misterius tahun 1982-1985). Lingkaran kekuasaan Soeharto dengan campur tangan militer, khususnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menjadi salah satu penyebab kasus petrus terjadi. Sesuai dengan tujuan penelitian dapat digambarkan konsepsi berpikir dalam kajian ini diantaranya sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Pada kerangka berpikir dalam kajian penelitian ini bahwa tiga tahun kejadian petrus dianggap sebuah siklus seperti kinerja atau mekanisme sebuah mesin yang berputar dengan kekuatan. Soeharto ialah kekuatan yang paling besar atas kejadian tersebut karena ia ialah orang yang paling bertanggung jawab atas kejadian tersebut. ABRI sebagai alat yang Soeharto gunakan untuk memberantas gali. ABRI sebagai pertahanan negara melakukan perlindungan atas nama rakyat yang pada saat itu mengalami keresahan atas perilaku gali yang telah membuat masyarakat dan negara resah atas sikap mereka. Pengaruh militer pada saat itu sangat besar, sebab adanya Dwifungsi ABRI. *Hard power* dilakukan Soeharto atas dasar mempertahankan stabilitas keamanan nasional. Selain itu, akibat dwifungsi ABRI tersebut kinerja aparaturnya keamanan tidak berfungsi secara stabil. Pada BAB IV penulis akan menjelaskan hal tersebut dengan rinci sesuai dengan analisis secara ilmiah. Sehingga penembakan misterius tersebut terjadi.

### C. Penelitian Terdahulu

Sebuah kajian penelitian yang menganalisis sebuah isu dimasa lalu agar tidak dilupakan sebagai sejarah yang hilang, maka harus disajikan dengan ilmiah, penulis merangkum beberapa penelitian yang membahas kasus petrus sebagai objek penelitiannya. Beberapa penelitian ini akan membantu penulis untuk menggali informasi serta mengkajinya secara lebih detail dan konperhensif. Berikut hasil-hasil penelitian tersebut penulis simpulkan dalam sebuah tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	ISI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	<i>David Bouchier,</i>  Buku: <i>(CRIME, LAW AND STATE AUTHORITY IN INDONESIA. Law, Crime and State Authority in Indonesia" in Arief Budiman (ed) State and Civil Society in Indonesia, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Clayton, Victoria.)</i>	<i>David</i> menjelaskan latarbelakang kejadian Petrus, serta bagaimana politik Indonesia pada masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kriminalitas yang terjadi menyebabkan militer yang pada saat itu disebut ABRI menggunakan kekuatannya untuk membunuh dan menganiaya preman-preman pada tahun 1982 – 1985. Bahkan dalam	<i>David</i> dan penelitian yang penulis kaji memiliki persamaan dalam meneliti kejadian Penembakan Misterius atau Petrus.	<i>David</i> mengungkap banyak fakta kriminalitas yang penulis jadikan acuan untuk memperkuat fakta dalam kajian ini, namun fokus penelitian penulis pada politik keamanan pada masa orde baru. Kasus Petrus sebagai fokus penelitian.

		<p>penelitian <i>David</i> menjelaskan dengan rinci bagaimana kronologis kejadian penembakan tersebut, suasana yang terjadi di Yogyakarta pada saat itu, hingga kondisi korban penembakan.</p>		
2.	Susanto Zuhdi,	<p>Berisi lebih 50 esai pendek, 80 foto disertai keterangan, dan 500 foto bersejarah, buku ini sesungguhnya merupakan dokumen untuk pembaca yang berminat pada politik dan kebudayaan modern Indonesia. Buku ini merupakan terbitan monumental yang belum pernah dilakukan mengenai sejarah kontemporer Indonesia, yang disajikan dengan beragam jenis foto secara komprehensif:</p>	<p>Penelitian ini fokus pada politik soeharto. Hal yang sama dengan penelitian yang penulis kaji.</p>	<p>Sebuah antologi sejarah kepresidenan soeharto, tidak terlalu fokus pada permasalahan petrus.</p>



		<p>yaitu masa pemerintahan Soeharto, yang dimulai dari peristiwa 1965 dan 1966 hingga pemilihan presiden secara langsung pada 2004. Buku ini mulai disusun pada tahun 1997, ketika pemerintah Indonesia bergulat mengatasi krisis ekonomi Asia.</p>		
3.	<p>Dini Rahdianti, Rahayu dan Joko Setiyono,</p> <p>(Jurnal: Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui proses Rekonsiliasi di Indonesia)</p>	<p>Penelitian tersebut meneliti tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada zaat Soeharto menjabat sebagai Presiden RI selama 32 tahun. Pada kurun waktu tersebut enurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 jenis kasus yang melanggar hak asasi manusia, namun hingga saat ini negara gagal mengadili</p>	<p>Studi kasus penelitian terjadi pada masa orde baru.</p>	<p>Penelitian tersebut terlalu fokus dengan hukum dalam Hak Asasi Manusia.</p>

		kasus-kasus tersebut dimasa lampau.		
4.	Muhammad Rizki Nuriman  (Skripsi: Kekuatan Kekuatan Polittk Indonesia Masa Orde Baru)	Membahasa mengenai Kekuatan Politik Militer Pada Masa Orde Baru dimana militer sangat berperan aktif dalam kekuasaan presiden Soeharto	Persamaannya membahas mengenai politik militer di masa Orde Baru	Namun, dalam penelitian tersebut perbedaanya adalah tidak membahas mengenai Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
5.	Bagus Purbaya,	Pada penelitian ini penulis mengkaji politik keamanan masa orde baru (studi kasus tentang gerakan penembakan misterius tahun 1982-1985).	Persamaan penelitian ini dengan beberapa penelitian lain ialah mengkaji mengenai kasus penembakan misterius 1982-1985	Pada kajian ini penelitian perihal Bagaimana kasus penembakan misterius (Petrus) pada tahun 1982 – 1985 terjadi. dan Bagaimana Strategi orde baru terkait politik keamanan pada masa 1982-1985

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*methodos*” dan “*logos*”. *Methodos* (metode) “*methodos*” yang terdiri dari 2 kata yaitu “*metha*” artinya melewati, menempuh atau melalui dan kata “*hodos*” yang artinya cara atau jalan. Maka dari itu pengertian dari “Metode” ialah cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan dan sedangkan logos berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Jadi Metodologi merupakan ilmu atau cara yang digunakan dalam memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan dan tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau yang diteliti secara ilmiah<sup>21</sup>.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan<sup>22</sup>. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian

---

<sup>21</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif). (Bandung : Alfabeta, 2017), hal.1.

<sup>22</sup> Ibid, hal.2.

adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>23</sup>.

## **B. Metode Penelitian Kualitatif**

Pada penelitian ini penulis memilih metode penelitian kualitatif. Metode ini dianggap sesuai karena penulis berharap hasil dari penelitian ini menyajikan data dari sumber informasi yang akurat dan lebih mendalam. Sehingga, isu yang terjadi dapat dikemukakan secara ilmiah. Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi yang berupa gagasan atau pemikiran para tokoh yang bersifat dekriptif eksploratif.

Metode penelitian kualitatif pada kajian penelitian ini lebih terfokus pada pendekatan sejarah yang sumber datanya terdiri dari :

1. Buku-buku, artikel-artikel dan karya tulis lainnya yang pernah dibuat oleh para tokoh yang gagasannya diangkat sebagai karya ilmiah.
2. Bagi gagasan yang bersifat kelompok, dan institusi sumber data utama adalah dokumen-dokumen tertulis yang diterbitkan oleh kelompok/institusi yang bersangkutan.
3. Sumber data selanjutnya yang lebih penting adalah pidato dan wawancara yang pernah dilakukan oleh tokoh penting negara atau dunia.
4. Sumber data selanjutnya ialah tulisan yang dibuat oleh orang lain tentang tokoh tertentu yang biasa disebut biografi atau tulisan yang dibuat oleh tokoh bersangkutan tentang dirinya sendiri (otobiografi).

---

<sup>23</sup> Hamid Darmadi. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. (Bandung : Alfabeta), hal.153.

Keempat sumber data tersebut menunjang penulis untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh dengan deskripsi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif juga digunakan dalam kajian penelitian ini. Deskriptif sebagai cara yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dalam pembahasan.

Adapun metode pembahasan yang digunakan, yaitu deskriptif analisis, menurut Suryabrata bahwa penelitian dengan menggunakan metode pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data-data dalam rangka menguji hipotesa atau menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Sedangkan analisis secara harfiah berarti uraian, namun hal ini analisis berarti suatu bahasan dengan cara mengolah data, memberikan interpretasi terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun<sup>24</sup>. Kemudian, pendapat lain yang mendukung ialah mengenai metode deskriptif analisis menurut Masri dan Sofian<sup>25</sup>, mereka mengungkapkan bahwa suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan cara interpretasi terhadap data tersebut. Adapun ciri-ciri dari data deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual
- b. Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisis.

---

<sup>24</sup> Sunardi Suryabrata. 1995. Metode Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hal. 18

<sup>25</sup> Masri Singaribun dan Sofian Effendi (ed). 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta hal.63.

Sementara Sukmadinata menjelaskan penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang lainya<sup>26</sup>.

### C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah studi kasus. Penelitian ini menyajikan data mengenai penembakan misterius yang terjadi pada masa orde baru pada kurun waktu 1982-1985. Gaya kepemimpinan Soeharto saat menjadi presiden Orde Baru tidak banyak yang berani memberitakan di koran tentangnya secara lebih detail, sebab masa itu ialah rezim otoriter. Studi ini terfokus pada studi strategi kepemimpinan pada masa Orde Baru mengenai politik keamanan. Petrus terjadi sebagai kasus yang dianggap melanggar HAM, akan tetapi hingga saat ini kasus tersebut belum dapat terungkap secara lebih jelas. Media masa sudah tidak memberitakannya lagi.

Pendekatan penelitian studi kasus ini memudahkan penulis untuk mengamati kasus yang terjadi pada saat ini. Menurut *Harisson* pendekatan studi kasus dapat mempermudah penulis dalam riset politik, karena keterbatasan biaya dan waktu kita mungkin akan lebih baik menggunakan data yang sudah dibuat oleh pihak lain ketimbang membuat sendiri “*database*” baru<sup>27</sup>. Kasus yang terjadi

---

<sup>26</sup> Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Graha Aksara : Bandung. Hal, 72

<sup>27</sup> Lisa Harisson. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana. Hal, 141.

telah banyak diberitakan media masa pasca-reformasi, oleh sebab itu dapat digunakan sebagai sumber informasi.

Namun, pada pendekatan studi kasus penulis menyadari harus hati-hati dalam menggunakan sumber dari media masa, perlu analisis secara terstruktur dan substantif untuk memperoleh data konkret. Data yang diperoleh pun harus selektif dipilih. Data yang diambil berupa arsip dan dokumentasi historis. Arsip dan dokumentasi historis berasal dari kumpulan dokumen pada zaman dahulu, sehingga itu dapat dijadikan sebagai data yang akan digunakan nanti.

Dengan demikian pendekatan studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, serta peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan, pendapat tersebut dikemukakan oleh *Stake*<sup>28</sup>.

#### **D. Studi Pustaka**

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Library Research* atau Studi Pustaka. Yakni dengan cara pengumpulan data dengan menghimpun buku-buku dan dokumen-dokumen serta sarana informasi lainnya yang tentu saja berhubungan dengan masalah penelitian ini<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> John W. Creswell. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal, 19.

<sup>29</sup> Nawawi.2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Ugm Press. Hal, 30.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan/literatur bisa berupa kajian buku ilmiah, buku ajar, peraturan perundang-undangan, pemikiran tokoh tentang pendidikan atau lainnya. Alasan menggunakan penelitian kepustakaan sesuai jenis penelitian kualitatif biasanya adalah karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna dari sumber tertulis. Alasan lain yang lebih pasti adalah karena penelitian kepustakaan ditujukan untuk memahami masalah secara mendalam guna menemukan pola, hipotesis, atau teori.

Pada bagian ini perlu dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan sebagai cara pandang untuk mendukung penelitian. Diantara jenis pendekatan penelitian ini adalah: filosofis, historis, sosiologis, antropologis, atau lainnya. Dalam sebuah penelitian memungkinkan penggabungan dua jenis pendekatan atau lebih dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi<sup>30</sup>.

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh peneliti, dan empat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitiannya<sup>31</sup>, yaitu:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Op.cit* hal. 9.

<sup>31</sup> Zed Mestika.2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) hal. 4-5



kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks menjadi bagian fundamental dalam penelitian kepustakaan.

- b. Data pustaka bersifat siap pakai *ready mode*, artinya peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun demikian, peneliti yang ingin memanfaatkan perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian.
- c. Data kepustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- d. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekam tape atau film).

#### **E. Metode Analisis Data**

Ada delapan langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian studi pustaka<sup>32</sup>, yaitu:

- a. Mendaftar semua variable yang perlu diteliti.
- b. Mencari setiap variable pada subjek *encyclopedia*.

---

<sup>32</sup> Mestika *Ibid*, hal. 16-23

- c. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia.
- d. Memeriksa indeks yang memuat variable-variable dan topik masalah yang diteliti.
- e. Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- f. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- g. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi dan kartu catatan. Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda namanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan dengan judul buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun penerbitannya. Sedangkan pada kartu catatan, peneliti dapat menulis kutipan dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca.
- h. Dalam langkah terakhir, yaitu proses penulisan penelitian dari bahan-bahan yang telah terkumpul dijadikan satu dalam sebuah konsep penelitian.

## **F. Pengolahan Data dan Analisis Data**

Kumpulan informasi atau keterangan secara alfabetis atau numerik yang perlu diolah disebut dengan data. Yanuar berpendapat bahwa data kualitatif merupakan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata<sup>33</sup>. Data diperoleh dari berbagai teknik dan cara objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, dan sintesa data yang diperoleh sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu kesimpulan yang diperoleh sifatnya masih berupa hipotesis<sup>34</sup>.

Kemudian, untuk mengetahui bagaimana data kualitatif dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk penelitian ilmiah, maka perlu diketahui beberapa hal. Adapun data yang penulis peroleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan cara berikut ini :

### **1. Pengolahan Data**

Pada kajian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik ini penulis anggap sesuai dengan situasi dan kondisi dalam penelitian. Penulis mengumpulkan berbagai sumber informasi dari berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian penulis, artikel-artikel yang di publikasikan secara online di internet dan karya ilmiah yang telah ditulis oleh peneliti sebelum penulis. Karya-karya tersebut menjadi sumber data utama yang diolah secara deskripsi.

---

<sup>33</sup> Dr. Drs. Yanuar Ikb, MA. 2014. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah. Bandung : PT. Refika Aditama, hal.155.

<sup>34</sup> Yanuar, Ibid, hal. 185.

Hasil dari pengumpulan data dilaksanakan dengan selektif berdasarkan atas ketentuan penyusunan dokumen. Dokumen-dokumen yang diperoleh disesuaikan dengan arah pembahasan pada penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa hasil dari pemikiran atau gagasan sesuai dengan fakta sejarah yang mengungkap isu yang terjadi. Lalu penulis, menganalisisnya menggunakan metode analisis yang dianggap sesuai dengan isu yang diangkat.

## **2. Analisis Data**

Kajian penelitian ini mengambil informasi atau keterangan yang telah terjadi di masa lalu. Analisis data menggunakan penelitian sejarah ialah salah satu upaya untuk merekonstruksi kejadian-kejadian dimasa lalu secara sistematis. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, mudah dibaca dan dipahami sehingga kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis, selanjutnya untuk memberikan inti makna pemecahan masalah maka penulis mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada. Adapun terdapat beberapa tahapan analisis data kualitatif di atas dapat dikategorikan dala beberapa hal sebagai berikut :

### **a) Analisis Isi**

Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media Massa. Pelopor analisis ini adalah *Harold D. Laswell*, yang memelopori teknik simbol *coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi tersebut menjelaskan data yang penulis dapat dijabarkan secara lebih rinci.

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian.

#### b) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan data tanpa bermaksud menggeneralisasikan atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok dan bagian data itu saja.

#### c) *Inter-Text Analysis*

Inter-Text Analysis adalah suatu aktivitas menganalisis data teks seperti email, blog, tweet, forum dan bentuk lainnya. Teks dapat dimasukkan dalam kategori data tidak terstruktur (*unstructured data*). Karena pembahasan pengertian analisis teks.

### **3. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang penelitian ini. Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>35</sup> Atau data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, serta teori yang membahas mengenai politik keamanan masa orde baru (studi kasus gerakan penembakan misterius).

b) Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya<sup>36</sup>. Studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari jurnal, skripsi, data-data penelitian terdahulu maupun buku dari sumber data primer. Dalam hal ini, sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang penulis bahas mengenai politik keamanan masa orde baru (studi kasus gerakan penembakan misterius).

---

<sup>35</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 91

<sup>36</sup> Azwar *Ibid*, hal. 91.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Orde Baru Tahun 1982-1985

Adanya suatu negara berarti terdapat suatu wilayah yang berdaulat, diakui secara *de jure* dan *de facto*, pemerintah dan pemerintahan, serta masyarakat yang menempati di wilayah tersebut. Menurut *Harold J Laski*<sup>37</sup>, negara merupakan suatu masyarakat yang disatukan sebab memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara lebih agung daripada individu atau kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat yang termasuk dalam sebuah negara jika cara hidup yang harus ditaati. Tujuan negara menurut *Laski* adalah menciptakan keadaan yang rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Terdapat minimum fungsi mutlak yang harus dimiliki oleh negara yaitu :

1. melaksanakan penertiban (*Law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan negara bertindak sebagai stabilisator.
2. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
4. menegakkan keadilan. Hal dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

---

<sup>37</sup> Abu Bakar Ebyhara, P.hD. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. Hal, 233-234.

Pengertian tersebut penulis ambil untuk mendefinisikan negara Indonesia pada masa Orde Baru. Negara Indonesia pada masa tersebut mengalami dinamika politik yang langsung diatur oleh kepala negara. Menganut sistem demokrasi, akan tetapi tata pelaksanaan pemerintah yang otoriter dan cenderung menggunakan *hard power* untuk mengatur kepentingan.

Pada tahun 1966 sejarah mencatat tumbangnya rezim Orde Lama dan munculnya Orde Baru. Pada tahun yang sama Mayjend Soeharto dipilih sementara oleh Majelis Permusyawaratan Sementara untuk menjadi pejabat presiden. Kemudian, pada tahun selanjutnya, Soeharto ditetapkan menjadi kepala pemerintahan yang sah. Kemunculan Orde Baru merupakan babak awal dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Pada masa periode pemerintahan Presiden Soeharto akronim yang populer untuk rezimnya ialah Orba. Sejarah mencatat bahwa rezim tersebut berdiri sejak 11 Maret 1966 sejak beliau mendapatkan mandat melalui Supersemar.

Kemudian, penulis mencari informasi mengenai asal usul Orde Baru, lalu menemukan data bahwa menurut kamus sejarah Indonesia yang disusun oleh *Robert Cribb* dan *Audrey Kahin*<sup>38</sup> definisi Orde Baru merupakan istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Selanjutnya, pendapat yang sama dengan *Cribb* dan *Kahin* ialah menurut Hersri Setiawan dalam Kamus Gestok bahwa Orba merujuk sistem pemerintahan baru yang diberlakukan di Indonesia sejak 11 Maret 1966. Orde Baru berakhir sebagai sistem sejak pemerintahan baru hasil

---

<sup>38</sup> Martin Sitompul. Asal-usul Istilah Orde Baru. (Online) <https://historia.id/politik/articles/asal-usul-istilah-orde-baru-DAoE7>. Diakses pada 10 September 2019 pukul 09.21 WIB.



pemilu 1998 terbentuk. Sedangkan, menurut Harsutejo dalam Kamus Kejahatan Orba, ia berpendapat bahwa tonggak Orde Baru bermula pada 1 Oktober 1965. Soeharto telah memegang kekuasaan nyata ketika beliau menentang perintah Soekarno yang meminta Pangdam Jaya Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Jenderal Pranoto untuk menghadap ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma.

Menurut *Crib* dan *Kahin* sebutan rezim Orde Baru pertama kali digunakan untuk menunjukan atau merujuk koalisi antara Angkatan Darat, mahasiswa, intelektual, dan Muslim yang menentang Soekarno dan PKI. Lengkapnya mereka mengungkapkan bahwa “Istilah ini segera menunjukkan perbedaan mendasar dari Orde Lama Soekarno, terutama dalam kebijakan pemerintah”. Dalam perjalanan kekuasaan Orde Baru selalu berusaha menghilangkan PKI dan memengaruhi masyarakat dan negara dari pengaruh penulis kiri. Kemudian di bidang ekonomi, membuka negara untuk investasi asing. Pada dinamika politik rezim Orba membenarkan penindasan kepentingan kelompok tertentu atas nama pembangunan.<sup>39</sup>”

Penulis berpandangan bahwa negara Indonesia saat rezim Soeharto berkuasa seperti bentuk negara organis-pluralis. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat seorang ahli, bahwa pada masa orde baru menurut Abdul Aziz Thaba bahwa menerapkan negara organis dengan sifat pluralis dalam suatu pemerintahan. Sebagai negara organik, Indonesia mempunyai kemandirian yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*

cukup besar dan bukan merupakan cerminan dari tuntutan dan kepentingan dalam masyarakat.

Dengan demikian, negara berperan aktif dalam mengambil keputusan meskipun tidak demokratis. Konsep negara model ini menurut Kamuarruzaman tidak memberlakukan slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, selanjutnya negara dengan model seperti ini dalam perkembangannya akan berubah menjadi negara yang totalitarisme<sup>40</sup>. Sebuah pemikiran totalitarisme berasal dari sistem yang totaliter. Pada sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus total didalam masyarakatnya, tetapi juga konflik total dengan musuhnya didalam negeri. Namun, untuk mencapai konsensus total tidak hanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, tetapi juga pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam<sup>41</sup>.

Pada masa orde baru Soebiyono<sup>42</sup> menyatakan bahwa seluruh peraturan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di letakan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintahan orde baru bermaksud melakukan penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara. Kekuatan orde baru yang paling sentral adalah melibatkan militer dalam penyusunan agenda orde baru sehingga militer menjadi garda terdepan dalam rezim.

“ABRI pada masa Orde Baru selalu diikuti sertakan dalam program pembangunan, salah satunya yaitu “ Adapaun modal dasar yang disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional ialah : (a) Kemerdekaan dan Kedaulatan bangsa, (b) Kedudukan geografi, (c) Sumber-sumber kekayaan alam, (d) Jumlah penduduk, (e) Modal rohaniah

---

<sup>40</sup> Dr. H. Undang A. Kamaluddin, M.Ag dan Muhammad Alfian, M.Ag. 2015. *Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia. Halaman 104.

<sup>41</sup> Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo. Halaman, 286.

<sup>42</sup> Kamaluddin dan Alfian. *Loc.cit, halaman 104*.

dan mental, (f) Modal budaya, (g) Potensi efektifitas bangsa, (h) Angkatan bersenjata (Marwati Djoenet Poesponegoro, Notosusanto, 1993:442). Pada masa Orde Baru di bidang eksekutif ABRI menyumbangkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk melaksanakan tugas negara dan pemerintahan di banyak bidang mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, di pusat maupun di daerah. Di samping itu ABRI juga menyumbangkan gagasan dan pikirannya berupa konsep-konsep kepada pemerintah, maka ABRI sebagai kekuatan sosial politik selalu membantu pelaksanaan program-program Repelita untuk mencapai cita-cita Orde Baru (Soebijono, 1992:40).<sup>43</sup>”

Militer dilibatkan dalam berbagai institusi yang dibangun orde baru untuk menunjang dan menjalankan kekuasaannya dalam bidang politik dan ekonomi.

Usaha yang dilakukan oleh orde baru adalah untuk mengamankan agenda politik.

Berlakunya dwifungsi ABRI menjadi dasar legitimasi bagi peran sosial politik ABRI. Cikal bakal dari pemikiran itu adalah konsepsi Nasution tentang jalan tengah ABRI pada 1985, jalan tengah itu artinya pemberian kesempatan pada ABRI sebagai salah satu kekuatan politik bangsa untuk berperan serta dalam pemerintahan. Atas dasar konsepsi tersebut, dwifungsi ABRI memberikan pembenaran bagi ABRI untuk tidak hanya berperan di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dibidang sosial dan politik. Hal tersebut memberikan peluang bagi ABRI untuk dapat menduduki jabatan sipil tanpa meninggalkan statusnya sebagai anggota ABRI<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Prihatanti, Maskun dan Syaiful M. 2013. TINJAUAN HISTORIS TENTANG KETERLIBATAN MILITER DALAM PEMERINTAHAN SOEHARTO PADA MASA AWAL ORDE BARU. Vol 1, No 4 (2013). PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah). (Online) <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/issue/view/174>. Diakses pada 10 Spetember 2019 pukul 11.21 WIB.

<sup>44</sup> Kamaluddin dan Alfian. *Loc.cit*, halaman 111-112.

## 1. Perekonomian Orde Baru

Dinamika perekonomian Orde Baru mengalami perjalanan yang tidak mudah, karena peninggalan rezim Orde Lama adalah tingginya inflasi, artinya nilai rupiah tidak stabil dengan harga barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat. Pada awal 1980-an harga minyak dunia mulai jatuh lagi. Kemudian, tahun 1985 reposisi mata uang menambah hutang luar negeri Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan usaha-usaha baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi.

Langkah pemerintah pada tahun 1983<sup>45</sup> ialah mengevaluasi nilai rupiah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang bertumbuh. Kemudian, dari segi kebijakan pemerintah menerapkan Undang-Undang tentang pajak yang baru untuk menambah pendapatan dari pajak non minyak dan tindakan-tindakan deregulasi perbankan dilakukan, misalnya *credit ceilings* untuk suku bunga dihapuskan dan bank diizinkan untuk menentukan tingkat suku bunga dengan bebas. Sehingga, pemerintah mengubah ketergantungan perekonomian yang berasal dari minyak kepada sebuah perekonomian yang memiliki sektor swasta yang kompetitif, serta berorientasi pada pasar ekspor. Hal tersebut dilakukan untuk memengaruhi tindakan-tindakan deregulasi baru dalam memperbaiki iklim investasi bagi para investor swasta. Ketika harga minyak jatuh tersebut, pemerintah meningkatkan tindakan-tindakan untuk mendukung pertumbuhan yang didorong oleh ekspor, contohnya pembebasan bea-cukai impor dan pengulangan devaluasi rupiah. Dengan demikian, investasi asing yang berorientasi pada ekspor disambut secara

---

<sup>45</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia. SEJARAH BANK INDONESIA : MONETER Periode 1983-1997. (Online)

khusus. Sektor keuangan Indonesia merupakan sektor lain yang juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan deregulasi yang mendalam. Beberapa bank swasta baru diizinkan untuk didirikan, sementara bank yang sudah ada bisa membuka cabang-cabang di seluruh negeri. Selain itu juga beberapa bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta.

Soeharto yang memiliki panggilan akrab Pak Harto ialah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya. Strategi yang dilakukan oleh Soeharto ialah Trilogi Pembangunan yakni stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Bahkan sempat mendapat penghargaan dari *FAO* atas keberhasilan menggapai swasembada pangan pada tahun 1985. Maka, saat itu pantas saja Presiden Soeharto mendapatkan anugerah penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Nasional<sup>46</sup>.

Akan tetapi, dalam perjalanan selama kurun waktu 1980 sampai dengan 1985 tersebut pencapaian Soeharto dalam memajukan perekonomian di Indonesia diiringi banyak masalah yang terjadi. Bank Indonesia mencatat sejarah keuangan periode 1982 sampai dengan 1983 bahwa perekonomian di Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat terutama disebabkan oleh menurunnya harga minyak di pasaran dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian dalam negeri<sup>47</sup>. Daya saing produk Indonesia menurun karena nilai rupiah *over valued* akibat tingginya laju inflasi dibandingkan dengan

---

<sup>46</sup> Biografi Tokoh : Referensi Biografi Tokoh dan Publik Figure. (Online) <https://bio.or.id/biografi-presiden-soeharto/>. Diakses pada 11 Agustus 2019 pukul 21.22 WIB.

<sup>47</sup> Unit Khusus Museum Bank Indonesia: Sejarah Bank Indonesia. SEJARAH BANK INDONESIA: MONETER Periode 1983-1997. (Online) Diakses pada 12 Agustus 2019 pukul 11.23 WIB.

negara pesaing atau negara rekanan dagang utama Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi semakin menurun tajam dan defisit neraca pembayaran cukup besar. Untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia, maka ditempuh beberapa kebijakan pengendalian moneter yang menuju ke arah mekanisme pasar. Kebijakan tersebut diawali dengan mendevalusi nilai tukar rupiah pada 30 Maret 1983 dari Rp702,50 menjadi Rp970 per USD, hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan daya saing Indonesia<sup>48</sup>. Selanjutnya, diambil langkah deregulasi di bidang keuangan dan moneter berupa Paket Kebijakan 1 Juni 1983 dengan maksud utama untuk mendorong kemandirian dunia perbankan. Kebijakan itu disebut juga dengan PAKJUN 83. Langkah tersebut merupakan cara awal deregulasi sektor moneter sebagai landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat untuk Indonesia dimasa mendatang. Deregulasi perbankan tersebut berkaitan dengan sektor perkreditan dan pengerahan dana. Inti dari kebijakan tersebut dari segi moneter adalah<sup>49</sup> :

- a) Kebebasan pada bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga deposito yang sebelumnya, suku bunga deposito ini masih diatur oleh Bank Indonesia.
- b) Ketentuan pagu kredit yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu instrumen intervensi langsung, dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah menggunakan instrumen tidak langsung yaitu penentuan cadangan wajib, operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto, dan *moral suasion*.

---

<sup>48</sup> *Ibid*,

<sup>49</sup> *Ibid*,

Hasilnya, selain telah meningkatkan simpanan masyarakat di bank, kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan moneter. Pada saat itu juga pengendalian moneter lebih mengutamakan penggunaan instrumen tidak langsung.

Menurut catatan Bank Indonesia<sup>50</sup> dari segi pengendalian uang beredar, kebijakan deregulasi tersebut telah mengubah mekanisme dan piranti pengendalian moneter. Pemerintah tidak lagi melakukan intervensi langsung dalam mengendalikan kebijakan moneter. Sejak bulan Februari 1984 Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan menyediakan fasilitas diskonto untuk keperluan operasi pasar terbuka (*open market operation*). SBI adalah instrumen moneter secara tidak langsung untuk menarik kelebihan uang beredar di masyarakat jika kondisi moneter terlalu ekspansif. Perbankan dapat memanfaatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki dengan membeli SBI, jika dana tersebut tidak dipinjamkan ke masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1984 cukup meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi inflasi terus melaju cukup tinggi akibat devaluasi rupiah dan naiknya harga BBM pada awal tahun 1984. Pada saat itu, beberapa bank tertentu bergantung pada dana Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sehingga BI bermaksud mengurangi ketergantungan beberapa bank terhadap PUAB dengan menetapkan batas maksimum bank untuk memperoleh dana di PUAB serta menyediakan Fasilitas Kredit Khusus (FKK) dengan jangka waktu satu tahun. Kemudian sejak tanggal 1 Februari 1985, setahun setelah penerbitan SBI, Bank

---

<sup>50</sup> *Ibid*,

Indonesia menerbitkan pula instrumen OPT baru berupa Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) untuk menambah jumlah uang yang beredar (ekspansi). Macam SBPU yang diperdagangkan terbatas pada surat sanggup (aksep/promes) dan wesel. Instrumen ini digunakan untuk pelaksanaan pemberian kredit dan pinjaman antar bank.<sup>51</sup>”

Catatan Bank Indonesia tersebut merupakan upaya pengendalian perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia periode 1982-1985 memang mengalami dinamika yang cukup signifikan memengaruhi kehidupan rakyatnya. Apabila Bank Indonesia berupaya untuk selalu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia dan mengalami keberhasilan pada tahun 1985. Kemajuan sistem keuangan biasanya mempermudah kehidupan perekonomian masyarakat. Kemajuan perekonomian juga dapat diukur dari beberapa indikator, tidak pada sektor perbankan saja.

## 2. Kriminalitas Orde Baru

Pada tahun 1981 laju populasi penduduk di Indonesia tercatat sebanyak 2.32 juta jiwa<sup>52</sup>. Kemudian, pada tahun yang sama juga laju stabilitas ekonomi mengalami kenaikan, inflasi pada tahun 1980 sebesar 16% dapat mencapai penurunan sebesar 7%<sup>53</sup>. Artinya sebetulnya perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, disatu sisi yang lain, dibalik rentetan keberhasilan yang dijabarkan Presiden Soeharto, kondisi kehidupan sosial di masyarakat tidak

---

<sup>51</sup> *Ibid*,

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik. 1982. (Online) <http://bps.go.id>. Diakses pada 12 Agustus 2019 pukul 13.23 WIB.

<sup>53</sup> Isi pidato presiden tahun 1982. Pada pidato tersebut Pak Harto menjabarkan pencapaian yang telah diraih selama satu tahun kepemimpinannya. Pidato rutin tahunan tersebut selalu dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus, sehari sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.



sebanding dengan pencapaian perekonomian. Menurut Johny, seorang mantan penjahat kawakan pada masa Orde Baru pada sebuah acara televisi swasta Indonesia<sup>54</sup> menyebutkan bahwa rakyat tidak merasakan perekonomian di Indonesia baik-baik saja, jika peningkatan perekonomian negara bagus, maka harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Orde Baru sebagai rezim otoriter yang didukung oleh militer dan tidak menghormati hak asasi manusia. Selama perjalanan rezim Orde Baru 3 dekade, pemerintah semakin tidak selaras dengan rakyat. Pembuatan beberapa keputusan politik dan ekonomi tidak sesuai dengan kehendak rakyat, pemerintah cenderung merebut hak masyarakat umum lalu diberikan kepada sekelompok kecil elit pendukung Soeharto. Tindakan korup menjadi rahasia yang dapat diketahui rakyat pada saat itu, namun pemerintah selalu berkelit. Akibat perkembangan-perkembangan dinamika sosial, kalangan intelektual secara natural bersuara, mereka berharap didengar dan berpartisipasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Akan tetapi, Soeharto tidak mendukung hal tersebut dan menempatkan lebih banyak batasan dalam masyarakat Indonesia. Misalnya dengan membatasi demonstrasi mahasiswa yang hanya bisa dilaksanakan di dalam kampus.

Keadaan tersebut membuat masyarakat mengalami frustrasi secara sosial. Sehingga, ada perampok yang menjarah toko emas demi rakyat miskin. Ironisnya tingkat kriminalitas di beberapa daerah justru semakin meningkat, seperti di

---

<sup>54</sup> PENGAKUAN JOHNY INDO, SANG PERAMPOK LEGENDARIS | ON THE SPOT 29/11/17. Sumber Youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=yMhBXAWNbaQ>.

Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Dalam pandangan *Friedman*<sup>55</sup> kemiskinan berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis-basis kekuasaan sosial tersebut meliputi :

1. Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan.
2. Sumber keuangan.
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial.
4. Jaringan sosial.
5. Pengetahuan dan keterampilan.
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Kemiskinan yang dimaksud merupakan kemiskinan yang dapat memicu tingkat kejahatan, karena negara dianggap gagal untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Artinya, pada periode tahun 1982-1985 tidak semua rakyat mempunyai kesamaan kesejahteraan. Kesenjangan masih terjadi. Sehingga faktor ekonomi dapat mendorong kriminalitas terjadi. Kriminalitas yang terjadi pada zaman Orde Baru selain sebab faktor ekonomi ialah bentuk dari goyahnya pertahanan hukum pada saat itu.

Berikut data yang penulis himpun dari Badan Pusat Statistik Pusat dari jumlah kriminalitas yang terjadi pada masa orde baru dengan kurun waktu 1982-1985. Adapun data tersebut ialah sebagai berikut :

---

<sup>55</sup> Erwan Agus Purwanto. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 (295-324).

Tabel 4.1 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran Yang Dilaporkan  
Menurut Jenisnya di Indonesia Tahun 1982-1985

No.	KEJAHATAN / PELANGGARAN	DILAPORKAN				
		1981	1982	1983	1984	1985
1.	Politik	4	4	1	33	8
2.	Terhadap Kepala Negara	1	19	2	-	-
3.	Terhadap Ketertiban	1.959	1.702	1.094	926	805
4.	Pembakaran	299	389	300	305	317
5.	Kebakaran	2.997	3.941	3.234	2.816	3.510
6.	Memberi Suap	28	97	118	122	151
7.	Menerima Suap	525	136	195	147	128
8.	Mata Uang	130	153	147	268	317
9.	Materai/Surat/Merk	461	562	629	722	601
10.	Perzinahan	142	128	152	477	365
11.	Melanggar Kesopanan	2.147	1.842	2.261	2.114	1.923
12.	Pemeriksaan	2.176	1.731	1.945	2.009	1.728
13.	Perjudian	1.972	1	1.889	2.092	2.420
14.	Penculikan	1.283	170	348	265	256
15.	Pembunuhan	1.616	1.547	1.769	1.457	1.549
16.	Penganiayaan berat	15.264	14.466	14.173	13.379	12.414
17.	Penganiayaan ringan	16.524	18.553	19.169	18.662	18.398
18.	Pencurian dengan pemberatan	98.199	84.552	78.670	50.964	61.195
19.	Pencurian ringan	11.738	16.480	13.516	26.884	10.854
20.	Pencurian dengan kekerasan	17.048	16.303	12.637	7.380	6.181
21.	Pemerasan	2.259	2.459	2.896	2.202	1.389
22.	Penggelapan	6.973	7.053	7.775	7.010	6.273
23.	Penipuan	13.592	13.995	15.215	14.910	13.617
24.	Merusak	4.855	5.330	5.593	4.960	4.552
25.	Penadahan	1.414	533	1.340	964	683
26.	Lain-lain	26.908	30.083	31.003	28.186	29.937
27.	Ekonomi	641	193	783	539	399
	<b>JUMLAH KEJAHATAN</b>	<b>230.155</b>	<b>223.768</b>	<b>216.884</b>	<b>189.793</b>	<b>179.970</b>
28.	KUHP	1.117	1.310	1.323	3.936	3.076
29.	Lalu Lintas	92.764	115.285	69.571	71.310	129.480
30.	Ekonomi	298	5.774	462	536	1.272

	<b>PELANGGARAN</b>	<b>94.179</b>	<b>122.369</b>	<b>71.356</b>	<b>75.782</b>	<b>133.828</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>324.334</b>	<b>346.137</b>	<b>288.240</b>	<b>265.575</b>	<b>313.798</b>

*Sumber: Website Badan Pusat Statistik*

Dari data diatas diketahui bahwa kriminalitas di Indonesia cukup tinggi dari tahun ke tahun, terjadi naik turun yang tidak berubah secara signifikan. Tentu saja adanya angka kriminalitas tersebut, membuat aparaturnegara memiliki tindakannya masing-masing. Kemudian, dibawah ini terdapat tabel penyelesaian kasus-kasus tersebut diantaranya :

Tabel 4.2 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran Yang Diselesaikan Menurut Jenisnya di Indonesia Tahun 1982-1985

No.	KEJAHATAN / PELANGGARAN	DISELESAIKAN				
		1981	1982	1983	1984	1985
1.	Politik	1	3	-	17	6
2.	Terhadap Kepala Negara	1	9	2	1	-
3.	Terhadap Ketertiban	962	671	541	514	378
4.	Pembakaran	158	155	171	147	193
5.	Kebakaran	1.974	2.758	2148	1.792	2.349
6.	Memberi Suap	17	59	80	42	74
7.	Menerima Suap	324	71	103	72	111
8.	Mata Uang	88	82	85	113	130
9.	Materai/Surat/Merk	262	245	321	421	385
10.	Perzinahan	102	73	88	285	251
11.	Melanggar Kesopanan	1.420	1.119	1.476	1.411	1.280
12.	Pemerksaan	1.457	1.038	1.261	1.320	1.182
13.	Perjudian	1.775	989	1.537	1.875	2.098
14.	Penculikan	178	86	149	143	114
15.	Pembunuhan	1.093	911	1.111	910	978
16.	Penganiayaan berat	9.339	7.844	8.124	8.297	8.077
17.	Penganiayaan ringan	10.882	10.974	12.129	12.243	12.510
18.	Pencurian dengan pemberatan	7.642	27.970	30.569	19.209	22.815
19.	Pencurian ringan	5.324	6.875	5.803	10.461	5.225

20.	Pencurian dengan kekerasan	6.173	4.921	4.506	2.865	2.086
21.	Pemerasan	1.351	1.216	1.521	1.046	782
22.	Penggelapan	3.691	3.341	4.044	3.716	3.556
23.	Penipuan	6.873	6.183	7.383	7.495	6.858
24.	Merusak	2.649	2.501	2.901	2.693	2.502
25.	Penadahan	1.217	426	1.107	736	740
26.	Lain-lain	18.384	18.634	20.035	18.492	22.070
27.	Ekonomi	543	143	583	383	119
	<b>JUMLAH KEJAHATAN</b>	<b>113.827</b>	<b>99.297</b>	<b>107.778</b>	<b>96.694</b>	<b>96.869</b>
28.	KUHP	1.134	714	1.164	3.273	2.916
29.	Lalu Lintas	73.932	80.717	53.734	68.428	120.358
30.	Ekonomi	211	5.727	394	439	1.184
	<b>PELANGGARAN</b>	<b>75.277</b>	<b>87.258</b>	<b>5.292</b>	<b>72.140</b>	<b>124.458</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>189.104</b>	<b>186.555</b>	<b>163.070</b>	<b>168.834</b>	<b>177.602</b>

Sumber: Website Badan Pusat Statistik

Dari jumlah angka kriminalitas yang terjadi, menurut penulis cukup sedikit kasus yang dapat diselesaikan aparat keamanan di Indonesia pada saat itu. Pada masa Orde Baru kedudukan Polri masih tetap digabung dalam institusi tunggal yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan berlandaskan pada UU Nomor 13 Tahun 1961. Adanya pengintegrasian tersebut menyebabkan peran dan fungsi Polri menjadi tidak maksimal karena berbagai persoalan keamanan dalam negeri diselesaikan oleh ABRI<sup>56</sup>. Dengan demikian, peran dan fungsi aparat keamanan di masa tersebut tidak sepenuhnya fokus pada penyelesaian permasalahan kriminalitas.

Sehingga, strategi Soeharto dalam pemerintahan pada kurun waktu tersebut ialah dengan mengkonstruksikan negara hukum sebagai bagian politik stabilitas kekuasaannya, seorang ilmuan politik bernama *Dwight King*

<sup>56</sup> Sarah Nuraini Siregar. 2016. Evaluasi Sepuluh Tahun Reformasi Polri. Jurnal Politik LIPI : <http://ejournal.politik.lipi.go.id>. Diakses pada 15 Agustus 2019 pukul 22.15 WIB.

menyebutnya dengan sebutan *bureaucratic authoritarian regime* atau dalam kontruksi *Guillermo O'Donnell* disebut dengan negara otoriter birokratik<sup>57</sup>. Seperti yang digambarkan oleh kedua ilmuwan tersebut, maka memang benar wajah negara otoriter di Indonesia terjadi dengan aturan yang dibuat penguasa. Dengan demikian, ada dua faktor yang berkaitan dalam negara Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru yakni Pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, negara hukum dan kekuasaan yang mengaturnya. Cara yang paling dianggap benar oleh Presiden Soeharto saat itu adalah membuat peraturan hukum yang mengatur tentang perekonomian rakyatnya, menekan tingkat kriminalitas dengan kekerasan atau tegas, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuat tatanan birokrasi dan kebijakan yang beliau kehendaki.

Aspek sosial, hukum, politik dan ekonomi memang selalu dapat berkaitan satu sama lain. Aspek-aspek tersebut menunjang untuk membuat strategi pemerintah dalam mengatur rakyatnya. Konsep negara berdasarkan hukum yang bersifat formal atau prosedural pada masa orde baru menjadi suatu hal yang sulit dijangkau oleh rakyat kecil, sebab dominasi dan hegemoni pemerintahan otoritarian memang menjauhkan negara hukum itu dari rakyat kecil. Ini artinya, pelaku kriminalitas dipandang sebagai rakyat kecil memiliki ruang yang sempit untuk kritis terhadap pemerintah. Sedangkan disisi yang lain kesenjangan perekonomian, semakin menutup rapat mereka. Begitulah negara dan pemerintahan orde baru pada kurun waktu 1982-1985 dalam bingkai sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

---

<sup>57</sup> Dr. Suparman Marzuki. 2014. Politik Hukum Hak Asasi Manusia. Bandung : Penerbit Erlangga.

## B. Hubungan Antara Ekonomi dan Gabungan Anak Liar (Gali)

Gabungan anak liar sebuah istilah untuk geng penjahat yang lihai merampok dan melakukan tindak kekerasan, terutama di wilayah Yogyakarta, membuat resah pemerintah pada 1970-an. Menurut Tadié, gali adalah sasaran utama operasi khusus untuk memberangus preman, yang kemudian dikenal dengan sebutan petrus (penembak misterius) pada 1983. Gali sebutan akrab bagi preman-preman yang berhasil mempunyai kekuasaan seperti di terminal dan identik dengan tato. Perilaku gali pada masa itu memang meresahkan masyarakat. Bus dibegal, toko dirampok, hingga kasus pemerkosaan. Penulis hanya mencontohkan sedikit dari gambaran informasi yang penulis kumpulkan, pada beberapa bagian dalam tulisan ini akan terkuak kejahatan gali kepada masyarakat hingga meresahkan.

Sebelumnya penulis menceritakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 1982-1985 mengalami peningkatan. Akan tetapi, sebuah berita *online* melansir bahwa perekonomian di masa Orde Baru itu lemah. Awalnya, Orba memang dipuja-puja karena berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6-7% per tahun. Tapi, pertumbuhan ekonomi itu ternyata ditopang oleh eksploitasi sumber daya alam, utang luar negeri pemerintah, utang elit swasta (konglomerat), serta sentralisasi keuangan. Artinya, pertumbuhan ekonomi itu tidak dibarengi dengan pemerataan kekayaan masyarakat. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap aja miskin<sup>58</sup>. Penulis juga telah mengungkapkan bahwa tingkat

---

<sup>58</sup> Paulus Risang. 2014. Alasan Kenapa Kamu Gak Perlu Kangen Sama Orde Baru. (Online) <https://www.hipwee.com/feature/ini-dia-alasan-kenapa-kamu-gak-perlu-kangen-sama-orde-baru/>. Diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 11.20 WIB.

kejahatan di Indonesia pada saat itu tinggi. Sebab utama adalah perekonomian yang tidak stabil.

Tadié mencatat, selama masa Orde Baru ada sekitar 60 geng pemuda berdiri. Mereka terdiri dari anak-anak muda yang hanya nongkrong di perempatan jalan hingga anak kompleks militer yang memiliki pistol dari ayahnya. Periode 1970-an, kehidupan jalanan semakin riuh. Sejumlah organisasi “kemasyarakatan” preman dibentuk. Menurut Tadié, organisasi-organisasi ini secara resmi memiliki tujuan mempekerjakan mantan narapidana, preman jenis apapun, agar mereka kembali menjadi anggota masyarakat dan memiliki pekerjaan.

Seorang magister Jurusan Sejarah Universitas Indonesia Muhammad Fauzi mengatakan, organisasi bagi preman tak hanya memudahkan pemimpin mengendalikan kekuasaannya dalam ruang lingkup tertentu, serta mengontrol sumber-sumber ekonomi di dalamnya, tapi juga dimanfaatkan untuk tujuan politik, dalam sebuah ruang yang menjadi wilayah dan jangkauan kekuasaannya. Ada pula organisasi preman yang bersentuhan dengan kekuasaan. Salah satunya, Tadié menyebut Yayasan Bina Kemanusiaan, yang beranggotakan orang Makassar, dibentuk pada 1981. Ahli geografi urban dan peneliti di Institut de Recherche pour le Developpement, Prancis ini menjelaskan, Yayasan Bina Kemanusiaan mendapatkan dana dari aktivitas perjudian. Organisasi ini dibentuk di bawah perlindungan salah seorang kerabat Tien Soeharto, dan berhubungan intim dengan Golongan Karya. Selain Yayasan Bina Kemanusiaan, ada The Prems di Jakarta, Fajar Menyingsing di Semarang, dan Massa 33 di Jawa Timur. Menurut pemimpin Fajar Menyingsing Bathi Mulyono dalam wawancaranya



dengan majalah Tempo edisi 6 Oktobab ber 2014, semasa Ali Moertopo berkuasa, para preman dibina dalam sejumlah organisasi<sup>59</sup>.

### C. Kasus Penembakan Misterius

Indonesia pernah mengalami masa kelam menurut sejarah Hak Asasi Manusia. Masa tersebut merenggut banyak korban jiwa. Akibat angka kriminalitas yang tinggi, negara melalui ABRI membuat sebuah keputusan menyelesaikan masalah dengan menggunakan *hard power*. Penulis merangkum kejadian-kejadian tersebut sesuai fakta sejarah yang pernah ditulis dalam media masa online atau media cetak. Sebuah majalah yang memuat konten sejarah bangsa Indonesia mengangkat kejadian petrus pada tahun 1982-1985.

Sejarah mencatat bagaimana Petrus (penembak misterius) di era Presiden Soeharto menjadi mesin efektif menekan kriminalitas di Indonesia. Semua preman yang memiliki catatan hitam ditembak mati ditempat, sementara mereka yang belum merasa ketakutan setengah mati menunggu giliran kapan dihabisi. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan penghargaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keberhasilan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Rapim ABRI yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 1982, Soeharto menugaskan polisi dan TNI mengambil langkah penanganan masalah yang efektif menekan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi

---

<sup>59</sup> Fandy Hutari. Senin, 26 Nov 2018 17:17 WIB. Hercules dan jejak preman masa Orde Baru. (Online) <https://www.alinea.id/nasional/hercules-dan-jejak-preman-masa-orde-baru-b1UAi9f5M>. Diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 12.30 WIB.

Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pangkoptamtib Laksamana Soedomo dalam rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Jaya tanggal 19 Januari 1983.

Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di masing-masing kota dan provinsi lainnya. Sebuah kisah yang penulis dapat sebagai sumber informasi dari artikel dari media sosial. Isinya berdasarkan pengalaman mantan preman yang pernah diburu pelaksana petrus. Bathi Mulyono mengemudikan sebuah mobil Toyota Hardtop pada malam hari melewati Kawi-Semarang pada tahun 1983. Tiba-tiba dua motor menyalip kencang sambil menembakan peluru dari pistol yang dibawa oleh pengendara motor tersebut yang tidak diketahui Bathi. Dua peluru menembus mobil. Akan tetapi, Bathi dapat menghindar dan selamat dari penembakan<sup>60</sup>.”

Apa yang ditulis dalam media tersebut menggambarkan betapa saat kejadian tersebut kondisi mencekam. Bathi Mulyono adalah seorang yang paling dicari oleh para eksekutor penembak, dia adalah seorang komandan preman era petrus. Komandan Bathi Mulyono merupakan seorang ketua organisasi Fajar Menyingsing yang dibentuk tahun 1983 yang beranggotakan 6000 orang mantan narapidana di Jawa Tengah dan Yogyakarta<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Republika. 29 Oktober 2017. Berita Republika Petrus: Kisah Gelap Sejarah Orba. (Online) <https://www.republika.id/2017/10/29/petrus-kisah-gelap-sejarah-gelap-orba/>. Diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 11.23 WIB.

<sup>61</sup> Tribun News, Editor: Y Gustaman. 29 Mei 2015 Kisah 'Komandan' Preman Fajar Menyingsing Era Penembakan Misterius. (Online) <https://www.tribunnews.com/regional/2015/05/29/kisah->

Gambar 4.1 Bathi Mulyono



Sumber : Media Online Tribun News

Atas kejadian tersebut memang faktanya, eksekutor memburu preman-preman yang dianggap membahayakan. Tentunya preman-preman kejadian tersebut membuat masyarakat resah. Seperti yang diungkapkan Soeharto pada pidato presiden tahun 1982.

“seperti yang telah penulis singgung dimuka keadaan stabilitas keamanan kita selama ini cukup mantap. Bahkan telah melampaui dengan selamat situasi yang peka dan rawan, .....<sup>62</sup>”

Adanya ancaman-ancaman dari preman tersebut membuat resah. Menurut *Webster's International Dictionary*, ancaman adalah sebuah pernyataan atau ekspresi atau keinginan untuk menyakiti, menghancurkan, menghukum atau membalas. Secara umum, ancaman dapat diartikan sebagai sebuah masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar sistem. Karena pemerintahan merasa terancam dengan apa yang dilakukan preman-preman tersebut, maka keputusan yang diambil untuk memerangi premanisme tersebut dengan penembakan.

---

[komandan-preman-fajar-menyingsing-era-penembakan-misterius](#). Diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 12.10 WIB.

<sup>62</sup> Presiden Soeharto. 1985. Amanat Kenegaraan IV 1982-1985. Jakarta : PT. Inti Idayu Press. Halaman 27.

Ancaman yang dilakukan oleh preman ini telah masuk pada ancaman dalam dimensi lingkup, karena melibatkan ekonomi, sosial, politik dan militer.

Selama 32 tahun Soeharto menjabat sebagai Presiden di Indonesia, kasus petrus ialah satu kasus besar yang terjadi pada masa orde baru. Soeharto seorang pemimpin yang selalu melaporkan hasil kerjanya selama satu tahun dalam pidato tahunan yang rutin beliau laksanakan pada tanggal 16 Agustus, tepat sehari sebelum perayaan kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato-pidato tersebut merupakan hal yang menurut penulis penting untuk dijadikan acuan analisis data primer, jika banyak asumsi yang menyudutkan bahwa otak dibalik petrus ialah Soeharto, penulis mencoba mengamati melalui pidato-pidato presiden pada kurun waktu 1982-1985.

Pidato kenegaraan tersebut ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, isinya berupa laporan tentang laporan perkembangan negara selama satu tahun yang telah dilalui. Laporan tersebut dapat dipandang sebagai neraca. Dari situ dapat diketahui posisi Indonesia saat itu, menilai keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu tersebut, dan sebagai acuan untuk menyusun rencana bagi Indonesia setahun kemudian. Pidato Soeharto yang isinya dokumen negara tersebut jelas isinya begitu sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban seorang Presiden kepada rakyatnya. Membaca dan memahami pidato itu merupakan salah satu cara untuk melihat wajah sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun.

“Hal ini berkat kewaspadaan dan kesadaran masyarakat yang tidak mudah terseret pada gelombang gerakan dan isu-isu yang tidak bertanggung-jawab dan juga berkat kewaspadaan dan kesigapan bertindak oleh alat-alat

negara – ABRI – yang selalu siap siaga untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>63</sup>”

Pada kedua kutipan pidato presiden tahun 1982 tersebut bahwa Soeharto selain mengungkapkan kondisi masyarakat yang terancam dengan isu dan kejadian yang meresahkan, beliau juga menyinggung tentang gelombang gerakan yang tidak bertanggung jawab. Gelombang gerakan tersebut memang dilakukan oleh kelompok Bathi Mulyono ini. Kemudian, dalam tulisan di republika menjelaskan kembali bagaimana dia bisa lolos dari operasi petrus.

“Sejak malam itu Bathi menghilang. Dia tak pulang ke rumah kendati istrinya, Siti Noerhayati, tengah hamil tua. Bathi memutuskan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran operasi pembasmian preman yang kerap disebut “Petrus” atau Penembakan Misterius. Sejak pertengahan 1983 Bathi hidup nomaden dan bersembunyi di Gunung Lawu. Dia baru berani turun gunung pada 1985, setelah Petrus mereda. Nasib Bathi masih mujur. Ribuan orang yang dituduh preman mati tanpa proses peradilan<sup>64</sup>.”

Tentunya dapat diketahui kejadian penembakan misterius memaksa individu yang dianggap sebagai preman untuk menyerah. Petrus memaksa mereka juga merasa ketakutan. Nasib preman dianggap sebagai pembayaran yang sah atas perilaku yang presiden katakan sebagai pembuat isu-isu yang tidak bertanggung-jawab.

“Bathi Mulyono bukan sembarang preman. Dia ketua Yayasan Fajar Menyingsing, organisasi massa yang menghimpun ribuan residivis dan pemuda di daerah Jawa Tengah. Organisasinya itu dibekingi oleh Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam, Ketua DPRD Jawa Tengah Widarto dan pengusaha Soetikno Widjojo. Dengan “restu” elite penguasa daerah, Bathi menjalankan bisnisnya mulai dari jasa broker sampai dengan lahan parkir di wilayah Jawa Tengah. Hubungan yang dibangun antara elite dengan para preman pun bergerak lebih jauh dari sekadar bisnis. Preman pun digunakan sebagai kelompok-kelompok milisi yang diberdayakan pada saat musim kampanye Pemilu tiba. Golongan Karya

<sup>63</sup> Presiden Soeharto. *Ibid*, halaman 27.

<sup>64</sup> Tribun News, Editor: Y Gustaman. 29 Mei 2015 Kisah 'Komandan' Preman Fajar Menyingsing Era Penembakan Misterius. (Online) <https://www.tribunnews.com/regional/2015/05/29/kisah-komandan-preman-fajar-menyingsing-era-penembakan-misterius>. Diakses pada 16 Agustus 2019 pukul 12.10 WIB

(Golkar) sebagai generator politik Orde Baru banyak menggunakan jasa para preman untuk menggalang massa dan mengamankan jalannya kampanye. Bathi dan kawan-kawannya salah satu kelompok yang digunakan oleh Golkar dalam kampanye Pemilu 1982. Tugasnya memprovokasi massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sedang berkampanye di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Insiden itu dikenal sebagai peristiwa Lapangan Banteng. Sejumlah korban berjatuh. Beberapa orang ditangkap atas tuduhan mengacau. Tapi Bathi dan kawan-kawan tak tersentuh. Ali Moertopo dituduh berada di belakang peristiwa itu dan tak beberapa lama kemudian Soeharto “membuangnya”<sup>65</sup>.”

Demi mempertahankan rezim, apapun dilakukan. Mungkin ungkapan tersebut yang patut menggambarkan situasi saat itu. Preman diburu seperti binatang buaya yang dianggap telah habis manfaatnya untuk ekosistem, karena bisa menerkam kapan saja. Gambaran itu seperti yang terjadi untuk rezim orde baru. *Siegel* berpendapat bahwa para preman itu seorang ekstrimis, akan tetapi mereka juga pantas untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun demikian, *Siegel* juga tidak membenarkan tindakan preman yang telah meresahkan masyarakat<sup>66</sup>.

“*Ian Wilson* dalam tulisannya “*The Rise and Fall of Political Gangster*” pada buku *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (2010: 201) mengatakan kalau keterlibatan preman di dunia politik berakar jauh dalam sejarah. Jenderal Nasution pun pernah menggunakan jasa mereka untuk menekan Presiden Sukarno membubarkan parlemen. Sementara itu *Robert Cribb* menyuguhkan fakta tentang keterlibatan bandit dalam politik dimulai sejak zaman revolusi kemerdekaan.”

Rezim orde baru mencontoh kekuatan untuk pertahanan rezim melalui peristiwa dimasa lalu yang dianggap penguasa saat itu menjadi sebuah kelaziman. Sehingga, ironis bukan hanya melindungi seluruh rakyat Indonesia, jika banyak korban yang mati terbunuh, padahal pada setiap pidato kenegaraan sehari sebelum kemerdekaan dirayakan, Soeharto selalu menghimbau perihal kemanusiaan. Pada

---

<sup>65</sup> *Ibid*,

<sup>66</sup> *Siegel*. Loc.cit.

zaman itu aktivitas politik belum tentu menjamin keselamatan hidup seseorang, berlaku juga untuk preman. Tokoh yang dianggap punya jasa untuk rezim seperti Bathi tetap menjadi incaran eksekutor.

“Sejumlah pentolan organisasi preman pun dicokok dan dihabisi nyawanya tanpa pernah ada yang tahu keberadaan mayatnya. Tokoh-tokoh preman yang juga jaringan Fajar Menyingsing telah lebih dulu dihabisi, antara lain Eddy Menpor dan Agus TGW. Mayat mereka tak pernah ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan pun tak tahu harus mencari dan mengadu kepada siapa. Pada 10 Juli 1983 halaman Minggu koran Merdeka secara khusus memberitakan tentang derita yang dialami oleh istri kedua pentolan preman Jakarta itu.”

Kisah yang ditulis dalam media online tersebut juga diceritakan oleh *Siegel* dalam bukunya yang berjudul *Penjahat Gaya (Orde) Baru. Siegel* dengan lugas dan tegas menjelaskan kondisi korban petrus. Kejadian-kejadian tersebut membuat kehilangan bukan hanya nyawa, tapi martabat dan harkat sebagai manusia.

“Cerita kelam ini bermula ketika Letkol. M. Hasbi, Komandan Kodim di Yogyakarta melancarkan Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK). Operasi yang diklaim hanya bertujuan mendata para pelaku kriminal. Namun apa yang dilakukan oleh M. Hasbi di Yogyakarta lebih dari sekadar mencatat. Eksekutor operasi tak segan menembak mati siapa saja yang mereka anggap sebagai gali (gabungan anak liar).”

Memang saat itu tingkat kriminalitas sangat tinggi. Banyak kejahatan penjarahan, penculikan dan pemerkosaan yang tidak manusiawi. Oleh sebab itu, presiden menganggap kejadian ini jangan dibiarkan. Karena, pelakunya preman hukuman yang saat itu pantas melalui ABRI dengan menembak semua pengacau yang meresakan masyarakat. Akan tetapi, keputusan yang diambil Soeharto tentu saja tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Malah masyarakat semakin trauma, meskipun maksud pemerintah mengambil keputusan tersebut untuk *shock therapy* agar preman-preman tersebut tidak berontak dimana-mana. Bukan hanya preman-

preman yang terlibat, warga sipil banyak yang merasa nyawanya terancam atas kejadian tersebut. *Siegel* mencatat bahwa preman-preman bertato tersebut ditembaki peluru oleh aparat ABRI yang juga berpakaian seperti preman. *Siegel* mengungkapkan analogi kejadian tersebut sebagai membunuh dengan bayangan sendiri “Pembunuhan Yang Ada Pada Citra Sendiri”. Pembunuhan tersebut sudah terencana dengan baik. *Siegel* juga mengungkapkan bahwa preman-preman tersebut berontak karena bangkitnya nilai-nilai nasionalisme<sup>67</sup>. Nilai-nilai nasionalisme tersebut menjadi faktor internal individu yang memaksa diri untuk melakukan pembelaan. Pembelaan tersebut untuk merebut apa yang seharusnya mereka dapatkan dari sebuah rezim. Kemudian, framing media masa bermunculan atas kejadian tersebut.

“Berita di koran-koran yang terbit pada masa itu pun hampir seluruhnya menampilkan penemuan mayat-mayat bertato dengan dada atau kepala berlubang ditembus peluru. Dalam sehari, di berbagai kota, hampir dapat dipastikan ada mayat-mayat dalam keadaan tangan terikat atau dimasukkan ke dalam karung yang diletakkan begitu saja di emperan toko, bantaran kali, dan di semak-semak. Berdasarkan pemberitaan media massa yang terbit pada saat itu, sejak awal Januari 1983 Kodam Jaya telah memulai operasi pemberantasan kejahatan dengan nama “Operasi Celurit”. Dalam operasi itu, Kodam Jaya berada langsung di bawah komando Pangkopkamtib Sudomo. Menurut keterangan Soedomo pada Sinar Harapan, 27 Juli 1983 operasi itu tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga untuk menginventarisasi nama-nama pelakunya.”

Kejadian petrus tersebut meninggalkan kesan yang buruk bagi masyarakat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput

---

<sup>67</sup> Siegel. *Loc.cit*, halaman 1-2.



aparap keamanan. Mayat-mayat tersebut dibiarkan tergeletak untuk menakut-nakuti masyarakat agar takut untuk berbuat kesalahan yang melawan rezim atau pelanggaran atas kemanusiaan yang disebut Soeharto untuk rakyatnya. Ada ketakutan yang kuasa dari pemerintahan Soeharto akibat kriminalitas meningkat, rezim merasa terancam dengan ulah preman-preman tersebut, bukan hanya untuk melindungi rakyat. Karena preman-preman tersebut dilibatkan dalam salah satu kesuksesan rezim, dan menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan. Namun, pada perjalanan mereka, penguasa rezim dan hamba sahaya<sup>68</sup> mengalami problematika. Sehingga, situasi tersebut dapat terjadi.

Gambar 4.2 Foto Kejadian Petrus



*Sumber : historia.id*

Berita-berita di media masa memberitakan banyak kejadian-kejadian penembakan tersebut. Sementara masyarakat merasa resah dengan kejadian petrus, para pejabat

---

<sup>68</sup> Siegel. *Loc.cit*, halaman 5.

tinggi negara menganggap kejadian itu sebagai hal yang wajar untuk menegakan hukum di Indonesia. Mereka pikir preman-preman itu memang pantas mendapatkan hukuman mati tertembak untuk menebus perlakuan yang telah mereka lakukan yang berbuat onar di masyarakat. Kepala Bakin Yoga Soegama menyatakan tak perlu mempersoalkan para penjahat yang mati secara misterius (Sinar Harapan, 23 Juli 1983).

Akan tetapi, ada pihak lain yang tidak setuju. Seperti H. Adam Malik, mantan Wakil Presiden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi penembakan misterius (Terbit, 25 Juli 1983).

“Jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil langsung ditembak, bila perlu diadili hari ini langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi,” Adam Malik mengingatkan, “setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran,” kecam pemuda angkatan 1945 itu.

Adam Malik merasa kejadian petrus tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, penembakan itu terlalu cepat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan untuk bertindak secara perikemanusiaan. Semua yang dianggap preman ditembak, siapapun yang bertato dianggap sebagai bagian dari gali. Akan tetapi, petrus yang semula dilakukan secara rahasia, ternyata dapat tersebar di masyarakat dan bahkan mendapatkan perhatian dari dunia luar. Sejumlah organisasi, antara lain Amnesty Internasional, mempermasalahkan pembunuhan yang sadis itu.

“Namun surat Amnesty Internasional dianggap sepi oleh pemerintah. Yoga Sugama menilai pembunuhan terhadap preman “Merupakan kepentingan yang lebih besar daripada mempersoalkan penjahat yang mati misterius, dan persoalan-persoalan asas yang dipermasalahkan,” katanya seperti dikutip dari Harian Gala, 25 Juli 1983.”

Kejadian penembakan itu memang ternyata bukan hanya meresahkan seluruh masyarakat di Indonesia, tetapi dunia internasional. Kejadian itu dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Faktor pelanggaran HAM pada kasus petrus tersebut adalah akibat penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Soeharto pada saat itu sebagai pemegang kekuasaan pertama di Indonesia yang membiarkan kejadian ini sebagai bentuk hukuman. Kemudian, aparat hukum tidak tegas, adanya dwifungsi ABRI pada saat itu menyebabkan fungsi polisi dan TNI tidak pada fungsinya masing-masing. Meskipun pemerintah beralih ini untuk sebuah kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh *Hans J. Morgenthau* dapat dirangkum dalam tiga bagian utama, yaitu :

1. Perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya.
2. Perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya. Ketiga, perlindungan terhadap kulturenya dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya.

Seorang Panglima TNI LB Moerdani disebut sebagai salah satu orang yang mendesain operasi Petrus. Moerdani juga berpendapat bahwa peristiwa itu dipicu oleh perang antar-genk. Namun, Moerdani memastikan bahwa kejadian tersebut ABRI tidak terlibat. Sementara itu, Soeharto beralih jika Petrus ditujukan sebagai usaha mencegah kejahatan seefektif mungkin dengan harapan menimbulkan efek jera. “Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor! dor! begitu saja. Bukan!

Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk *shock therapy*, terapi goncangan. Supaya, orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya<sup>69</sup>”. Setelah mendapatkan protes dari masyarakat dan tekanan dunia internasional, akhirnya pemerintah Orde Baru menghentikan operasi tersebut pada tahun 1985. Sejak dimulai pada akhir tahun 1982 hingga selesai korban tewas tercatat lebih dari seribu orang. Puncak tertinggi korban petrus terjadi pada 1983 dengan jumlah 781 orang tewas<sup>70</sup>.

Dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa militer di Indonesia saat itu sangat paling berperan. Karena itu masih kuatnya budaya militer dalam dunia politik, tanda-tanda yang dapat dengan mudah diketahui adalah penyelesaian masalah yang dilakukan selalu mengandalkan kekerasan atau *hard power*. *Hard Power* di definisikan sebagai kemampuan suatu pihak untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu yang dikehendaki pihak pertama. Pada kejadian petrus anggota militer ABRI dipaksa oleh penguasa rezim sebagai pihak pertama untuk menindak pelaku ancaman di masyarakat. Bentuk dari ancaman tersebut memaksa pemerintah untuk melindungi masyarakat yang merasa ada dalam ancaman akibat perilaku preman tersebut. Penembakan yang terjadi sebagai bentuk dari kebijakan yang diambil pemerintah. Kebijakan tersebut pada akhirnya melahirkan masalah yang besar dan dianggap melanggar hak hidup seseorang.

---

<sup>69</sup> Tribun News berita online yang sudah penulis validasi datanya dengan membandingkan informasi tersebut menggunakan buku yang ditulis oleh *James T. Siegel* melalui riset, buku itu juga penulis jadikan sebagai referensi.

<sup>70</sup> Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

#### D. ABRI Sebagai Alat Keamanan Masyarakat

*Samuel P. Huntington* seorang ilmuwan politik Amerika berpendapat bahwa perubahan *korps* perwira militer dari bentuk “penakluk” (*warrior*) menjadi kelompok profesional ditandai dengan bergesernya nilai dari “tentara pencari keuntungan” menjadi “tentara karena panggilan suci”, seperti pengabdian kepada negara. *Huntington* memberikan elaborasi tentang tumbuhnya profesionalisme militer yang memiliki tiga ciri yakni :

- a. Keahlian merupakan suatu kekuatan militer yang memerlukan pengetahuan baik untuk menambah kemampuan mengorganisir, merencanakan, dan mengarahkan aktivitasnya baik dalam keadaan perang maupun damai.
- b. Tanggung jawab sosial yang khusus bagi seorang perwira militer selain harus memiliki nilai-nilai moral yang tinggi dan terpisah dari insentif ekonomi juga mempunyai tanggung jawab pokok kepada negara. Seorang perwira militer harus memiliki sikap profesional yang tidak hanya tunduk patuh pada komandan. Seorang perwira berhak mengoreksi komandannya jika sang komandan bertentangan dengan kepentingan negara (*national interest*).
- c. Karakter korporasi (*corporate character*) yang melahirkan rasa *esprit de corps* yang kuat. Berbeda dengan kelompok profesional yang lain, korps perwira militer merupakan suatu “birokrasi profesional” yang anggota-anggotanya mengabdikan pada birokrasi negara, tapi sebagai suatu satuan dalam birokrasi negara korps perwira merupakan unit sosial yang otonom, yang memiliki kemandirian dalam birokrasi, lembaga pendidikan, jurnal, asosiasi, kebiasaan, dan tradisi.

Ketiga ciri tadi melahirkan yang *Huntington* sebut dengan “*The Military Mind*” yang menjadi dasar bagi hubungan militer dan negara. Inti *The Military Mind* adalah suatu ideologi yang berisi pengakuan militer profesional terhadap supremasi pemerintahan sipil. *Huntington* menganggap intervensi militer dalam politik sebagai tanda adanya pembusukan politik (*political decay*). Bagi *Huntington*, yang menekankan pembangunan politik melalui lembaga-lembaga politik, intervensi militer paling banyak dapat diterima jika merupakan suatu periode transisi dalam usaha menciptakan lembaga-lembaga politik yang kuat<sup>71</sup>.

Pada ulasan sebelumnya penulis menjelaskan bahwa kekuatan militer adalah unsur penting dalam kekuatan negara. Kekuatan militer sebagian besar terbentuk dari besarnya ukuran dan kuatnya tentara negara dan kekuatan angkatan laut dan udara yang dimilikinya serta kemampuan nuklir yang dimiliki. Bahwa kekuatan persenjataan merupakan faktor material paling penting bagi negara dalam membentuk kekuatan. Ciri yang sangat mudah untuk dikenali dari rezim orde baru adalah kekuatan militer yang sangat berperan hampir dalam seluruh sektor pemerintahan di Indonesia. Pada masa itu militer dianggap sebagai kekuatan untuk menyelesaikan konflik di Indonesia.

Orde Baru ialah penugas karyaan ABRI dalam lembaga/instansi/badan/ organisasi di luar jajaran ABRI sebagai pelaksana Dwi Fungsi ABRI. Maksud dan tujuan dari penugasan tersebut adalah pertama, sebagai pengamanan politis ideologis terutama pada saat awal Orde Baru. Kedua, dalam rangka penyuksesan

---

<sup>71</sup> Mohammad Siddiq. 2019. Profesionalisme Militer Pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Kajian Perbandingan Sosial-Historis). MADANI Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat Vol 11 No 1 (2019): Februari 2019 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857).

pembangunan nasional, untuk tercapainya sasaran program-program pembangunan yang tercantum dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Dilihat dari segi motivasi, dorongan dan urgensinya, maka penugaskaryaan prajurit ABRI pada masa Orde Baru dapat di klasifikasikan sebagai berikut<sup>72</sup>:

- a. Penugas karyaan yang sifatnya wajib untuk dipenuhi karena hal itu telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mengisi perwakilan golongan karya ABRI dalam Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat: MPR, DPR, dan DPRD.
- b. Penugasan dalam jabatan-jabatan yang pejabatnya ditentukan atas kehendak rakyat berdasarkan pilihan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR/DPR/ DPRD 6 yaitu untuk jabatan Presiden/Wakil Presiden berdasarkan pemilihan di MPR, Ketua / Anggota BPK dan Hakim Agung di Mahkamah Agung, yang perlu di usulkan / dimintakan pertimbangan dari DPR, jabatanjabatan Gubernur / Kepala Saerah tingkat I dan Bupati / Walikota Kota Madya Kepala Daerah tingkat II yang penentuannya berdasarkan pemilihan di DPRD I / II. Dalam hal ini ABRI mengajukan calon-calonnya melalui Fraksi ABRI atau memberikan persetujuan bagi prajurit ABRI yang dicalonkan oleh Fraksi Organisasi Peserta Pemilu dalam DPRD I/II.

---

<sup>72</sup> *Ibid*,

- c. Penugasan atas penunjukan dari Presiden / Kepala Negara antara lain untuk jabatan di Perwakilan RI di luar negeri, sebagai Menteri atau pejabat lain yang setingkat di bidang eksekutif.
- d. Penugasan atas permintaan dari pemerintah seperti untuk mengisi jabatan eselon I / II dan sebagainya.
- e. Penugasan ABRI dalam organisasi kemasyarakatan, atas permintaan dari organisasi yang bersangkutan kepada Pimpinan ABRI.

Budaya militer yang berkembang menyebabkan penyelesaian masalah selalu dengan kekerasan. Bukan disengaja, tetapi kecenderungan militer menempuh solusi melalui kekerasan merupakan langkah yang dianggap mampu menuntaskan seluruh permasalahan sampai pada akhirnya. Namun, Indonesia sebagai negara demokrasi menunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga solusi atas dasar kekerasan tersebut malah menimbulkan masalah yang besar muncul. Kekuatan militer pada masa orde baru sudah menjadi kekuatan yang hidup pada dimensi politik di Indonesia.

Kecenderungan militer dapat terlibat dalam proses sistem pembuatan keputusan biasanya berkaitan dengan peran-peran orientasi dan korporasi birokrasi. Sebagai korporasi militer menjalankan peran sebagai pelaksana intern keprofesiannya, serta melindungi dari pengaruh politik dari luar, sehingga dapat meningkatkan derajat otonomi militer. Otonomi militer dipertahankan melalui kepentingan politik dan pengaruhnya baik dalam lembaga-lembaga pemerintahan atau rezim. Sementara itu dalam suatu profesi birokrasi, militer berkecimpung



dalam politik hingga mampu menjadi *partner* bagi politik sipil dan para birokrat lain didalam perumusan dan penentuan kebijakan dalam keamanan nasional.

Militer sebagai salah satu kekuatan nasional merupakan kapabilitas maupun kapasitas negara dalam memberikan pengaruh. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat menciptakan kekuasaan. *Power* didefinisikan oleh *Morgenthau* tidak hanya sebagai sasaran melainkan juga sebagai tujuan, misalnya untuk memperbesar *power*, suatu negara mempergunakan kekuatan yang telah dimilikinya untuk dapat mencapainya. *Power* juga dapat diartikan sempit sebagai *force*. Rezim orde baru mempertahankan kekuatan militer sebagai pertahanan nasional. Kekuatan militer dianggap sebagai *power* untuk mempertahankan kedaulatan rakyat. Pada rezim orde baru, kekuatan militer begitu berpengaruh besar dalam setiap aspek, karena *background* dari presiden Soeharto ialah seorang petinggi militer.

#### 1. Konsep Kekuasaan Militer

Subjek kekuasaan telah menjadi minat para ilmuwan sosial selama beberapa dekade, seperti pada tulisan-tulisan *Aristoteles*, *Plato*, dan *Machiavelli*. Meskipun demikian perhatian besar, masih ada perdebatan akademis yang menonjol tentang definisi kekuasaan yang spesifik dan fitur-fiturnya, yang mengarah pada kompleksitas dan ambiguitas topik. Salah satu definisi kekuasaan yang paling berpengaruh di bidang ilmu sosial adalah milik *Max Weber* (1947: 152) yang mendefinisikannya sebagai probabilitas satu aktor dalam suatu hubungan sosial yang berada dalam posisi/jabatan untuk melakukan kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan. Kemudian, *Weber* berpendapat bahwa

kekuasaan adalah permainan *zero-sum* dan merupakan atribut yang berasal dari kualitas, sumber daya dan kemampuan satu subjek. Namun, definisi *Weberian* menarik sejumlah kritik. *Martin* (1971: 243) menunjukkan bahwa *Weber* tidak mendefinisikan kekuasaan, melainkan memberikan dasar untuk perbandingan antara atribut aktor. Apalagi penulis berpendapat bahwa, dengan membangun elemen konflik ke dalam definisi dan daya pandangnya semata-mata dalam istilah *zero-sum*, *Weber* mengabaikan kemungkinan hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan (*Martin*, 1971: 243). Sebaliknya, *Talcott Parsons* (1967) menawarkan konseptualisasi kekuasaan, yang memang demikian tidak mendefinisikannya dalam hal konflik, melainkan melihatnya sebagai sumber daya sistem. *Parsons* (1967: 208) berpendapat bahwa kekuasaan adalah kapasitas untuk mengamankan kinerja kewajiban yang mengikat unit dalam sistem organisasi kolektif, ketika kewajiban dilegitimasi dengan mengacu pada tujuan kolektif, dan di mana dalam kasus yang anggapan negatif menimbulkan sanksi. Dalam hal ini, *Anthony Giddens* (1968: 264) menyatakan bahwa, antara lain mendefinisikan *Parsonian* tidak memperhitungkan bahwa kekuasaan dilakukan atas seseorang dan oleh memperlakukan kekuasaan sebagai sesuatu yang sah dan dengan asumsi konsensus antara pemegang kekuasaan, *Parsons* mengabaikan karakter hierarkis kekuasaan. Singkatnya, *Weberian* dan *Parsonian*, keduanya memiliki definisi yang berbeda dan saling mengkritik, sehingga masalah definisi yang besar (*Martin*, 1971: 244). Ini adalah hanya dua contoh bagaimana diskusi kekuasaan menarik untuk perdebatan dan ketidaksepakatan yang intens.

Dengan demikian, hal ini adalah untuk menekankan bahwa kekuasaan adalah salah satu yang paling sentral dan konsep bermasalah dalam ilmu sosial. Meskipun digunakan secara luas, ada sedikit kesepakatan definisi dasar, dengan masing-masing ahli teori mengusulkan terminologi idiosinkratik mereka sendiri kekuatan. *Gallie* (1956) menegaskan bahwa karena adanya persaingan teori dan makna, kekuasaan pada dasarnya adalah subjek yang diperebutkan.

Ketika disiplin hubungan internasional berkembang, interpretasi yang kaku tentang kekuatan perlahan mulai berubah. Secara khusus, *Joseph Nye* (1990: 167) berpendapat bahwa itu perubahan sifat kerangka kerja internasional telah menekankan kembali penggunaan bentuk-bentuk tidak berwujud kekuatan, seperti budaya, ideologi, dan institusi. Mobilisasi sosial yang berkembang membuat faktor teknologi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi seperti, jika tidak lebih, signifikan seperti geografi, populasi, dan sumber daya. Sebaliknya, *Baldwin* (2012: 15) berpendapat bahwa pentingnya kekuatan militer sebelumnya telah dilebih-lebihkan, sementara peran nonmiliter bentuk kekuasaan telah diremehkan.

Kekuasaan militer yang kuat pada masa orde baru membuat kekuatan legitimasi militer luas di Indonesia. Pada sub bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa pemerintahan pada masa orde baru diisi oleh kekuatan militer akibat adanya Dwifungsi ABRI. Kekuasaan ini yang menyebabkan kekuasaan semakin kuat. Pada 6 April 1985 Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta Letkol CZI M. Hasbi mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha dan anggota masyarakat lainnya agar tidak lagi memberikan setoran kepada pemeras dan penjahat melalui tukang-tukang pungutnya. Selain itu ia mengingatkan para “gali”

agar segera menyerahkan diri dalam waktu singkat sebelum kesabaran aparat negara mencapai batasnya. Apabila para pihak “gali” tidak melaporkan diri ke pihak garnisun. Maka aparat yang akan menjemput paksa. Ia menyatakan bahwa pihaknya memiliki nama-nama gali yang telah disusun dalam suatu daftar hitam.

Dengan resep tembak ditempat. Para gali di yogya berjatuhan satu persatu tewas. Sisanya kocar-kacir. Sejumlah tokoh preman ditemukan tewas, rata-rata dengan luka tembak mematikan di kepala dan beberapa di bagian leher mereka. Beberapa di antara mereka adalah tokoh gali yang terkenal di masyarakat Yogyakarta.

Selain pembunuhan dan eksekusi di luar proses pengadilan sejumlah preman di Yogya juga mengalaih proses penangkapan secara semena-mena. Beberapa diantara mereka pada periode 1982-1985 sejak peristiwa Petrus memilih lari ke Jakarta. Namun, kemudian mereka karena Dandim 0734 Yogyakarta menjamin mereka tidak akan menjadi korban.

Banyak diantara korban mati mengalami penyiksaan sebelumnya. Diantara korban mati bisa dikenali adanya tanda-tanda yang terdapat pada jenazah mereka. Perang terhadap para gali di Yogyakarta juga menggunakan cara perampasan kemerdekaan. Secara umum korban biasanya dibawa oleh lebih dari 1 orang anggota ABRI yang kadang menggunakan seragam loreng tanpa adanya surat penangkapan. Sebagiaian lagi di jemput oleh orang bertopeng atau orang yang tak dikenal, baik oleh keluarga maupun masyarakat sekitar.

Pangdam VII Diponegoro baru Mayjen. TNI Soegiarto yang menggantikan Letjen. TNI Ismail, meneruskan kebijakan perang terhadap para

gali (gabungan anak liar). Akibat adanya tekanan ini banyak diantara para preman yang memilih menyerahkan diri kepada aparat. Dandim 0734 dan Garnisun Yogyakarta. Letkol Hasby, dalam pertemuan dengan 300 warga Pembauran Darma Nusantara, menerangkan jumlah gali di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melapor diri sampai minggu terakhir Mei 1983 tercatat 441 orang. Diantara yang melaporkan diri terdapat gali yang mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata Rp.50.000 perbulan. M. Hasby juga menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan operasi pemberantasan kejahatan di Yogyakarta.

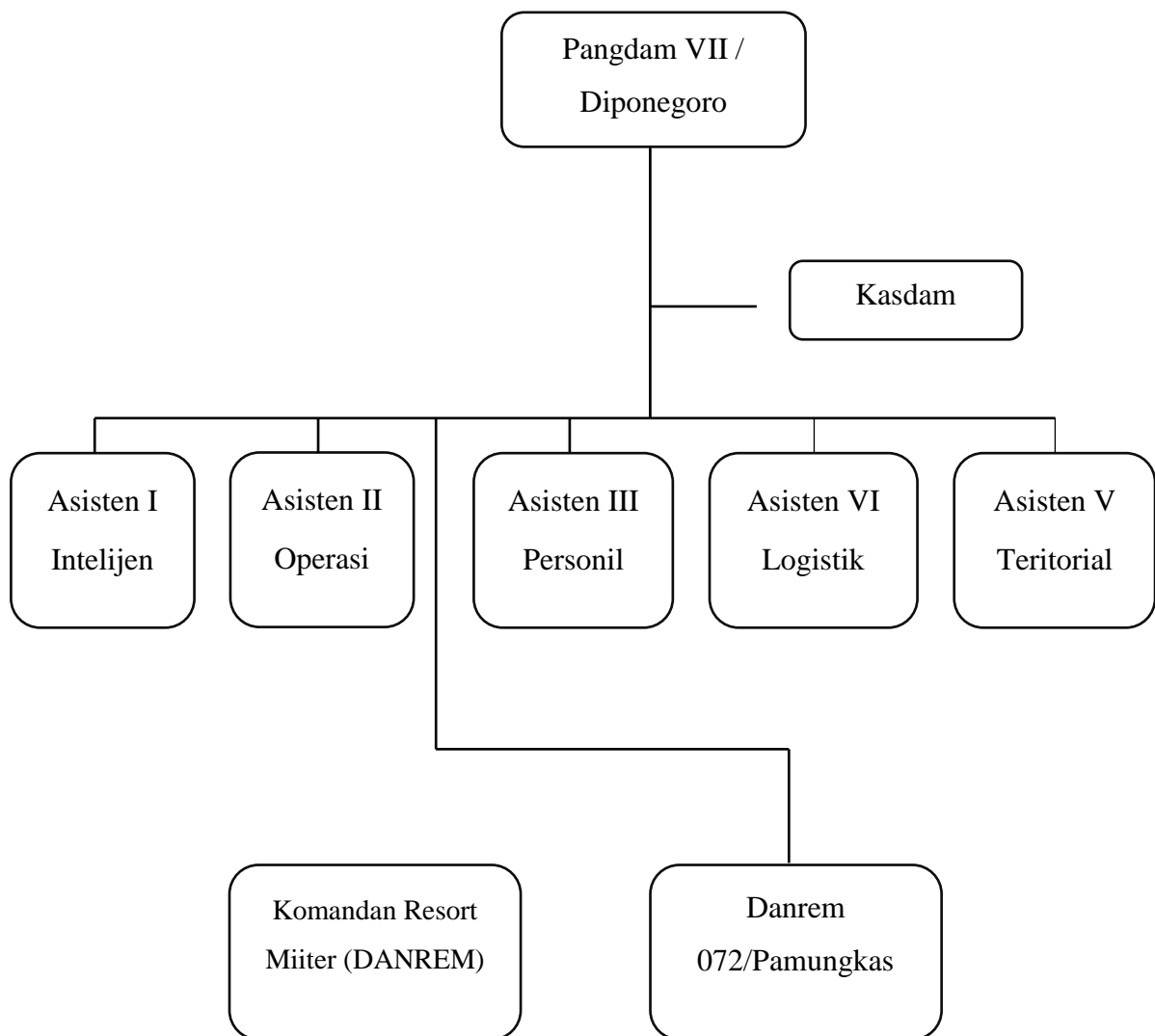
Sukses OPK (Operasi Pemberantasan Keamanan) / Petrus, membuat petinggi ABRI menerapkan ke daerah lain di Indonesia pelaksana khusus Jateng dan DIY Letkol. TNI Antono Margi menyatakan bahwa pihak laksusda tidak membedakan tindakan yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan, entah itu di DIY, Jateng atau daerah lainnya. Hanya tindakan para penjahat yang ada di Yogyakarta sangat keterlaluan. Kebijakan tersebut diambil mengingat bahwa kejahatan-kejahatan dari tindakan kriminal para preman tidak hanya terjadi di daerah Yogyakarta.

Isyarat kebijakan keamanan di DIY akan juga diterapkan ditempat lain di Jawa tengah. Muncul dari panglima Kodam VII Diponegoro Mayjen Ismail. Menyatakan “karena tindakan para gali di Yogya sudah keterlaluan maka dilakukan gebrakan-gebrakan atau *Shock Therapy* (Petrus). Syok terapi yang dilakukan pemerintah merupakan pengobatan kondisi mental kronis dengan terapi *electroconvulsive* atau dengan menginduksi syok fisiologis. Ini dilakukan untuk memberikan efek menakutkan bagi masyarakat secara mental. Rasa ketakutan

tersebut mengancam seseorang secara psikologis hingga menyebabkan ketakutan.

Itu yang terjadi pada saat kejadian petrus.

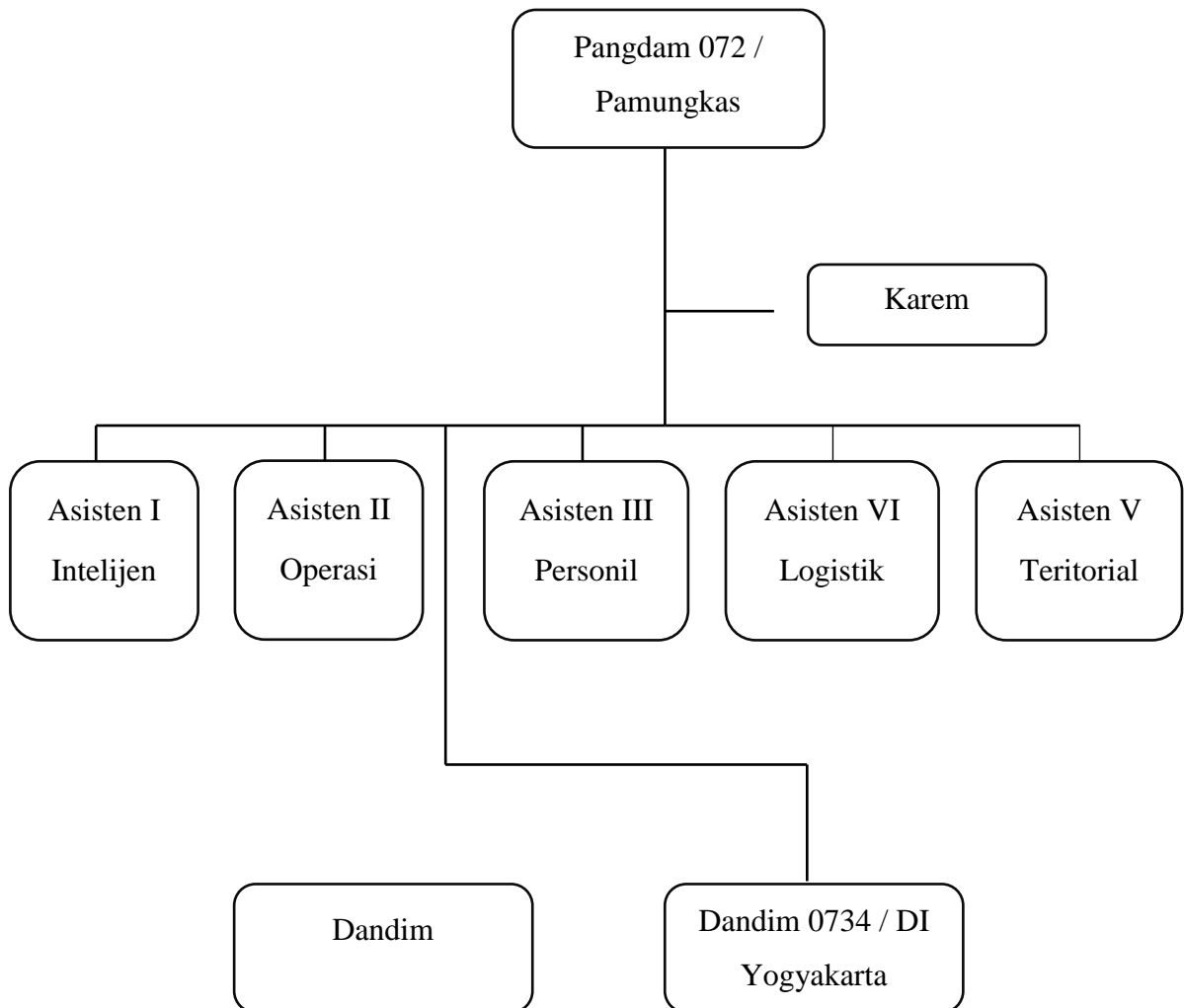
Gambar 4.3 Struktur Kodam VII / Diponegoro



Kawasan bagan Kodam VII / Diponegoro Periode 1982-1986 adalah:

- Pangdam VII / Diponegoro adalah Mayjen TNI Ismail dan digantikan oleh Mayjen TNI Soegiarto Kasdam adalah Brigjen T.B. Silalahi
- Asisten I Intelijen (Belum Teridentifikasi) Asisten II Operasi adalah Kol. Ambar S.
- Asisten III Personil (Belum Teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik adalah Kol. Sumardi
- Asisten V Teritorial (Belum Teridentifikasi)
- Danrem 072 / Pamungkas adalah Kol. CZI Siswadi

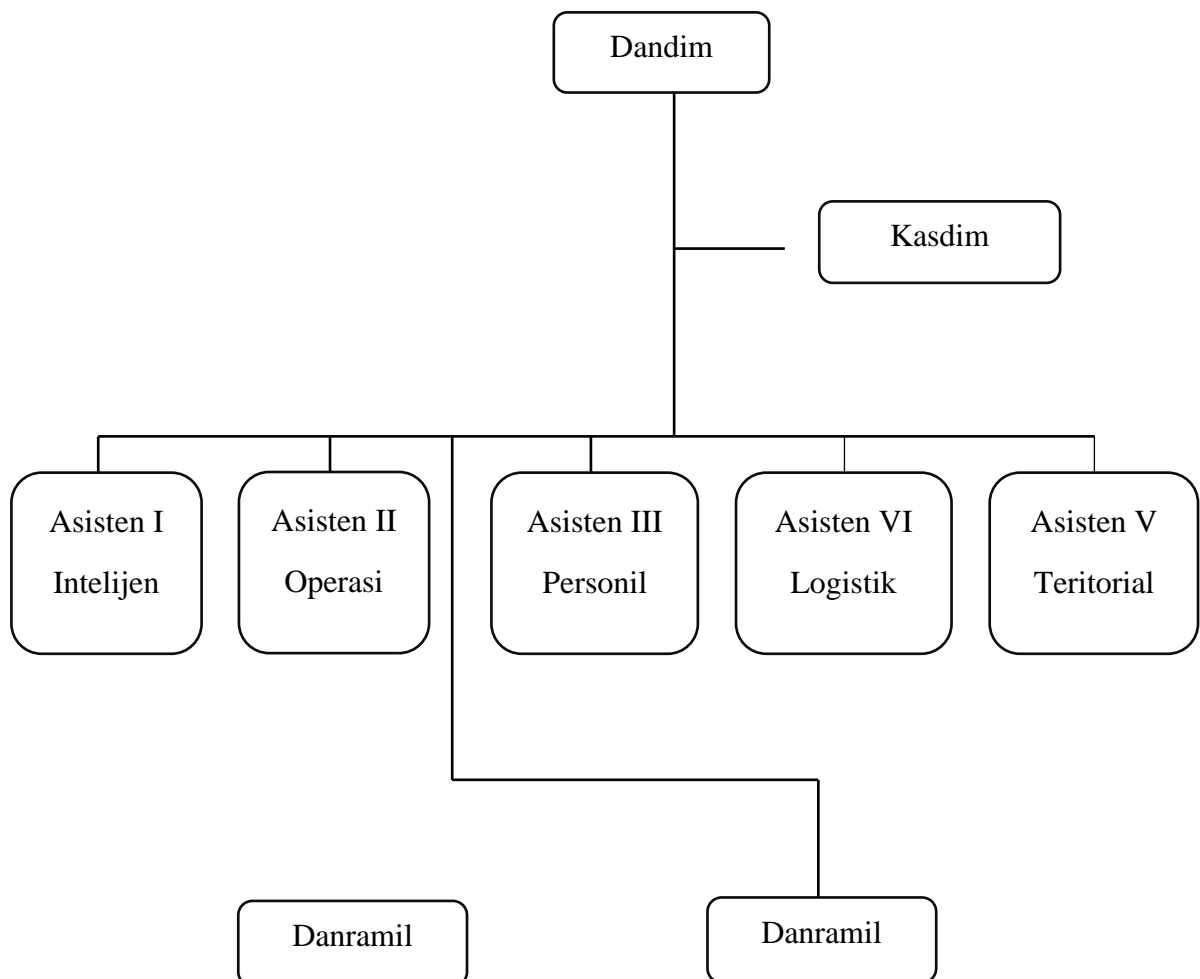
Gambar 4.4 Struktur Korem 072 / Pamungkas



Kawasan bagan Korem 072 / Pamungkas Periode 1982-1986 adalah:

- Danrem 072 / Pamungkas adalah Kol. CZI Siswandi
- Kasrem (Belum Teridentifikasi)
- Asisten I Intelijen (Belum Teridentifikasi)
- Asisten II Operasi (Belum Teridentifikasi)
- Asisten III Personil (Belum Teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik (Belum Teridentifikasi)
- Asisten V Teritorial (Belum Teridentifikasi)
- Dandim 0734 / Yogyakarta adalah Letkol. Muhammad Hasby

Gambar 4.5 Struktur Kodim 0734 / Yogyakarta





Kawasan bagan Korem 072 / Pamungkas Periode 1982-1986 adalah:

- Danrem 0734 / Yogyakarta adalah Kol. CZI Muhammad hasby
- Kasdim (Belum Teridentifikasi)
- Asisten I Intelijen (Belum Teridentifikasi)
- Asisten II Operasi (Belum Teridentifikasi)
- Asisten III Personil (Belum Teridentifikasi)
- Asisten IV Logistik (Belum Teridentifikasi)
- Asisten V Teritorial (Belum Teridentifikasi)
- Danramil (Belum Teridentifikasi)

## 2. *Hard Power*

Istilah *hard power* menggambarkan kemampuan suatu negara atau badan politik untuk menggunakan insentif ekonomi atau kekuatan militer untuk mempengaruhi perilaku aktor lain. Ini bergantung pada ukuran kekuatan yang dikemukakan oleh sekolah realis dalam teori hubungan internasional. Di sekolah realis, kekuasaan dikaitkan dengan kepemilikan sumber daya berwujud tertentu, termasuk populasi, wilayah, sumber daya alam, kekuatan ekonomi dan militer, antara lain. *Hard power* didefinisikan oleh penggunaan sumber daya tersebut untuk memacu perilaku entitas lain.

Kekuatan yang disinggung para pemikir ini adalah kekuatan yang keras. Istilah ini didefinisikan secara lebih eksplisit oleh para sarjana kontemporer di bidang hubungan internasional dan diplomasi publik. *Joseph Nye*, misalnya, mengidentifikasi *hard power* sebagai "kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan tingkat kekuatan ekonomi dan militer untuk membuat orang lain mengikuti kemauan penguasa"<sup>73</sup>. Strategi *hard power* mencakup berbagai langkah

---

<sup>73</sup> *Nye, Joseph*. 2008. "Think Again: Soft Power." *Foreign Policy*. (Online) 1 Mar. 2006 <http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=7059>. Diakses pada 12 September 2019 pukul 21.20 WIB.

yang diarahkan untuk memaksa atau mengancam entitas lain agar patuh. Langkah-langkah ini mungkin termasuk penggunaan kekuasaan, seperti ancaman serangan militer atau pelaksanaan embargo ekonomi. Mereka mungkin juga termasuk penggunaan kekuatan seperti janji perlindungan militer atau pengurangan hambatan perdagangan<sup>74</sup>. Dengan demikian, taktik *hard power* cenderung terlalu menekankan intervensi militer, sanksi ekonomi, dan diplomasi koersif.

Tabel 4.3 *Hard Power*

	<b>Tindakan</b>	<b>Instrumen Yang Digunakan</b>	<b>Kebijakan Yang Diambil</b>
<i>Hard Power</i>	Koersi <i>Deterrence</i> Perlindungan	Ancaman Kekuatan	Diplomasi Koersif Aliansi Perang

Sementara penggunaan *hard power* dapat berfungsi untuk mendorong kepatuhan, itu juga menghadirkan beberapa kelemahan yang mencolok terkait dengan legitimasi dan kredibilitas pengguna. Strategi *hard power* yang tidak memperhitungkan citra internasional suatu negara mungkin memiliki konsekuensi serius. Jika kredibilitas suatu negara di luar negeri memburuk, sikap ketidakpercayaan cenderung tumbuh sementara kerja sama internasional berkurang, sehingga kapasitas negara untuk mendapatkan tujuannya rusak.

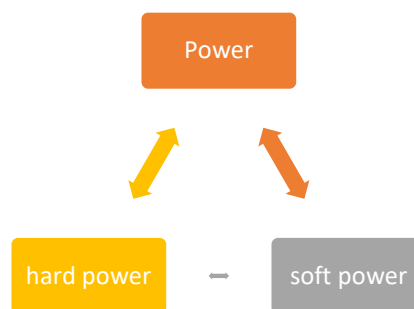
Konsep kekuasaan terletak di pusat geopolitik. Secara sederhana, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan seseorang. Ketika datang ke negara-negara, tingkat kekuasaan suatu negara telah menentukan apakah negara itu dapat memenuhi kewajiban nasionalnya. Tujuan-tujuan yang

<sup>74</sup> Public Diplomacy. Hard Power. (Online) [https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Hard\\_Power](https://publicdiplomacy.wikia.org/wiki/Hard_Power). Diakses pada 12 September 2019 pukul 23.00 WIB.

hampir abadi yang tidak bisa dihindari oleh suatu negara atau apakah itu lebih rendah dari negara-negara lain. Sejak *Joseph Nye* mempopulerkan gagasan tentang *soft power* pada awal 1990-an, itu biasanya beredar dalam diskusi tentang hubungan internasional. Biasanya disertai dengan keyakinan bahwa *hard power* adalah sesuatu dari masa lalu (khususnya dunia sebelum Perang Dunia II) dan yang menyatakan dalam usia "beradab" ini terlibat dalam diplomasi dan perdagangan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi beberapa hal tidak pernah berubah, dan masih belum ada pengganti untuk hard power.

*Nye* membagi power menjadi dua bentuk yaitu *hard* dan *soft*. Penulis akan mengadopsi definisi kekuasaan *Nye* sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, untuk mengadopsi bentuk kekuasaan *Nye* sebagai kerangka kerja untuk analisis. *Hard power* dan *soft power* dapat dianggap sebagai dua bentuk kekuatan murni.

Gambar 4.6 *Hard Power dan Soft Power*



*Hard power* atau perintah adalah bentuk kekuatan tertua yang terhubung dengan gagasan sistem internasional anarkis, di mana negara tidak mengakui otoritas superior dan dengan demikian harus fokus pada politik kekuasaan. *Hard power* didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan seseorang melalui tindakan atau ancaman paksaan, yang disebut 'wortel' dan 'tongkat' politik

internasional. Secara historis, *hard power* telah diukur dengan kriteria seperti ukuran populasi, wilayah, geografi, sumber daya alam, kekuatan militer, dan kekuatan ekonomi.

### 3. *Hard Power* Pada Kasus Penembakan Misterius 1982-1985

Kejadian penembakan misterius bukan hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi juga Jawa Tengah. Kepala Staf Kodak IX / Jawa Tengah Brigjen Pol. M Satoto menerangkan Operasi CeraH yang dilancarkan polisi Kodak IX / Jawa Tengah dan seluruh jajarannya awal desember hingga januari 1982, berhasil mengungkap kasus kejahatan terutama kejahatan dengan kekerasan, secara drastis dapat menurun. Tetapi yang menjadi tantangan aparat Polri disana adalah penjahat yang berasal dari luar kota. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jaya dan Sumatera bagian selatan.

Kapolda Metro Jaya Pol. Anton Soedjarwo pada 9 September 1982, mengatakan Dewasa ini timbul kecenderungan pergeseran sifat kejahatan ke arah yang lebih sadis. Sadisisme tersebut dilakukan penjahat disamping untuk menghilangkan jejak, juga untuk mempengaruhi psikologi dan moral masyarakat.

Pangdam VII Diponegoro Mayjen TNI Ismail di dampingi Kepala Penerangan Kodak VII, Letkol Inf Antono Margi ketika menerima pengurus PWI cabang Yogyakarta yang mengadakan audiensi ke Makodam VII Diponegoro pada 24 Januari 1983. Mengatakan “Kriminalitas akhir-akhir ini sudah tidak lagi semata-mata karena masalah perut”. Tetapi sudah mengarah ke demonstrasi keberingasan, ugal-ugalan, dan mengandung sistem nilai lain yang mungkin sudah berbau politis.”

Pada kesempatan tersebut, Pangdam VII Diponegoro menyatakan. “kita yang memberi rasa ayom kepada masyarakat terpanggil mencari modus lain yang tersembunyi, guna menghadapi demonstrasi ugal-ugalan itu. Kalau terpaksa tembak ditempat.”

Dukungan kepada operasi celurit (Petrus) tergambar dari pernyataan Asisten Operasi Jateng Kol. Pol Drs. Darmawan, yang menyatakan bahwa selama operasi petrus berlangsung di beberapa Korwil di Jateng berhasil di sita senjata tajam sebanyak 438 berupa celurit, klewang, badik, golok, dan trisula.

Pemuda bertatto tampaknya memang mendapat perhatian khusus dari aparat keamanan saat itu. Bahkan Danjen. Akabri Letjen TNI Moergito, mengatakan bahwa “jangan harap pemuda yang bertatto dapat diterima di Akabri, meskipun syarat untuk masuk Akabri diterima, karena dari segi estetika badan bertatto tidak layak jadi perwira”.

Tabel 4.4 Konsep *Hard Power* Dan Definisi

	<b>Tindakan</b>	<b>Instrumen Yang Digunakan</b>	<b>Kebijakan Yang Diambil</b>
<b><i>Hard Power</i></b>	Koersi merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan menggunakan tekanan sehingga salah satu pihak yang berinteraksi berada dalam keadaan lemah dibandingkan dengan pihak	Ancaman merupakan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan/atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa.	Diplomasi Koersif berkaitan dengan strategi diplomasi yang menggunakan ancaman sebagai kekuatan utama maka kekuatan militer menjadi aset penting yang dimiliki oleh pihak untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu.

	lawan.		
	<i>Deterrence</i> merupakan proses, cara, perbuatan untuk mendesak	Kekuatan merupakan desakan atau dorongan efektif yang menjurus pada tindakan sosial	Aliansi merupakan ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik.
	Perlindungan merupakan upaya untuk menjaga agar tidak rusak.		Perang merupakan permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya).

Pada konsep *hard power* dalam kasus penembakan misterius pada tabel diatas penulis telah mendefinisikan tahapan-tahapan pada setiap yang berhubungan dengan *hard power*. Kemudian penulis sajikan hasil kajian mengenai kasus tersebut sesuai dengan pendapat *Nye* mengenai *hard power*. Adapun hal itu tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 *Hard Power* Dalam Kasus Penembakan Misterius

	<b>Tindakan</b>	<b>Instrumen Yang Digunakan</b>	<b>Kebijakan Yang Diambil</b>
<b><i>Hard Power</i></b>	Koersi sebuah cara pemerintahan Soeharto untuk menekan preman-preman yang dianggap pembawa masalah agar tunduk, takut, dan patuh terhadap pemerintah.	Ancaman yang dilakukan oleh pemerintah rezim orde baru ialah pada <i>shock therapy</i> yang diinstruksikan Soeharto kepada ABRI untuk menakut-nakuti masyarakat dan preman yang dianggap antek-antek.	Diplomasi Koersif dilakukan pemerintah hanya untuk membangun suasana menyeramkan, agar pemerintah semakin ditakuti dan dipatuhi.
	Penolakan yang dilakukan oleh pemerintah	Kekuatan yang digunakan untuk menangani masalah	Pada kejadian petrus penulis tidak menemukan

	<p>terhadap perlakuan preman yang dianggap membawa dampak negatif untuk stabilitas keamanan di daerah. Preman melakukan tindak kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat sipil. Misalnya, tindakan pemerkosaan, penjarahan, dan kekerasan fisik lainnya.</p>	<p>preman-preman yang membuat onar tersebut yakni dengan militer. ABRI pada masa itu sangat kuat peran dan pengaruhnya baik dalam sosial, ekonomi, dan politik. Dwifungsi ABRI memberikan mereka bisa bertindak dan membuat keputusan untuk mendukung rezim.</p>	<p>keterlibatan negara lain dalam kasus ini. Sebaliknya, pada subbab sebelumnya penulis menjelaskan bahwa ternyata dunia internasional menganggap bahwa kejadian petrus merupakan kejadian pelanggaran ham yang luar biasa.</p>
	<p>Kondisi tersebut memaksa negara melalui kekuasaan presiden membuat keputusan untuk menyerang dan membrantas preman-preman tersebut atas nama bangsa Indonesia untuk dilindungi. Pemerintah soeharto beralih apa yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman bagi</p>		<p>Kejadin petrus juga tidak menyebabkan perang antar daerah atau adanya keterlibatan negara lain.</p>

	kehidupan di Indonesia.		
--	-------------------------	--	--

Menjelaskan tentang keamanan negara. ABRI sebagai bentuk dari kekuatan dominan di Indonesia bertindak sebagai aparat berwenang untuk menjaga keamanan. Dwifungsi ABRI bukan hanya sekedar mempersilakan militer dalam mengambil keputusan secara birokratik. Namun, ABRI mempunyai banyak peran, yakni menjaga keamanan rakyat. Pada masa orde baru, kepolisian tergabung dalam ABRI, termasuk juga didalamnya TNI sebagai aparaturnya penjaga keamanan.

Kepolisian merupakan institusi keamanan dan alat negara yang diberikan kewenangan tertentu yang sifatnya perlu pengaturan dan kontrol yang kuat secara struktural dan tersentralisir oleh negara. Pengontrolan tersebut memang berdampak secara birokratis tetapi hal itu memang menjadi konsekuensi logis dari sebuah pengontrolan dan pengawasan alat negara yang dapat melakukan kekerasan secara legal dalam konteks pengelolaan keamanan masyarakat.

Peran sosial politik ABRI yang dominan dan kedudukan Polri yang menjadi satu dalam naungan institusi ABRI. Beberapa tindakan kekerasan militer yang dilakukan oleh ABRI terhadap masyarakat dengan alasan atas nama negara dan melegalkan kekerasan menjadi tidak tersentuh oleh hukum yang semestinya menjadi fungsi kepolisian saat itu. Tidak ada perbedaan fungsi yang jelas di lapangan antara kepolisian dan ABRI. Selain itu dampak kultur militeristik juga tertanam dalam kepolisian khususnya di tingkat para anggotanya sehingga kultur



keduanya baik kepolisian maupun ABRI tidak dapat dibedakan yakni militeristik yang sarat dengan kekerasan terhadap masyarakat.

Pada kasus penembakan misterius kepolisian tidak terlalu berperan secara maksimal. Para penembak-penembak misterius itu kebanyakan memakai atribut TNI. Secara definitif polisi adalah lembaga negara yang melakukan operasi di bawah otoritas nasional atau idealnya di bawah kendali otoritas sipil politik negara tersebut. Secara umum polisi merupakan perwakilan negara yang paling jelas terlihat dalam masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai macam badan kepolisian yang dapat berbeda beda di tiap negara Karakteristik institusi sebuah kepolisian akan selalu tergantung pada negara dan penduduknya. Mereka akan selalu mencerminkan bangsa atau wilayah dalam budaya politiknya sejarah perkembangan masyarakat serta perekonomian negara tersebut. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa karakter polisi di sebuah negara akan selalu tergantung dari sejarah perkembangan institusi polisi itu sendiri termasuk kepolisian di Indonesia.

Dari beberapa uraian diatas ketahuilah bahwa terjadinya petrus adalah akibat dari besarnya kekuasaan otoritarian dan lemahnya aparaturnya keamanan negara. Indonesia saat itu mudah sekali terjebak pada konflik dan kekerasan adalah penyelesaian yang dianggap baik. Akan tetapi, hal itu justru mencerminkan bahwa keamanan nasional di Indonesia itu lemah. Kondisi tersebut berkaitan dengan *latent power*, Power merujuk pada kemampuan sosial-ekonomi negara yang ditujukan untuk membangun kekuatan militernya. Kemampuan sosial-ekonomi negara ini biasanya berupa kekayaan negara dan populasi di dalam negara.

Populasi disini berperan penting karena negara yang kuat membutuhkan banyak tentara yang bisa didirikan dari banyaknya populasi yang dimiliki. Banyaknya populasi yang dimaksud dapat memperkuat pertahanan bangunan kekuatan militer. Oleh sebab itu, pelaku penembakan misterius tidak mengandalkan kekuatan yang sedikit, banyak keterlibatan para aktor. Menurut Lembaga Penelitian Indonesia mengenai politik di Indonesia tahun 1982-1985 ketika kejadian petrus berlangsung, banyak aparat selain TNI dan Polisi yang terlibat, aparat sipil dari tingkat terendah sampai tingkat paling atas mendukung operasi tersebut, seperti RT, RW, Lurah/kepala Desa, Camat/Walikota, hingga Gubernur. Sehingga, sebuah kewajaran jika korban petrus dibiarkan begitu saja untuk membuat ketakutan, sebab aparaturnya juga memaklumi hal tersebut.

#### **E. Kasus Penembakan Misterius Dalam Perspektif ABRI**

Peristiwa penembakan misterius dalam pandangan militer merupakan upaya negara untuk menjaga keamanan nasional. Pada penjelasan sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana ABRI melaksanakan eksekusi penembakan misterius kepada preman-preman yang dianggap membuat rusuh dan mengancam stabilitas keamanan masyarakat. Tujuan nasional Indonesia telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut negara mempunyai dua kewajiban sekaligus yang menjadi dasar/alasan keberadaan negara dari aspek kontrak sosial

antara individu dan masyarakat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan warga negara. Dengan demikian, keamanan nasional adalah salah satu pilar dari keberadaan negara. Akan tetapi, pada sisi yang lain ada aspek yang berbeda yakni kesejahteraan dan ekonomi.

Secara umum kepentingan keamanan nasional dapat dilihat dari dua aspek yaitu *issue* atau *threat-based national security* yang melihat keamanan nasional dari masalah-masalah atau ancaman-ancaman apa yang sedang atau diproyeksikan yang akan mengancam pencapaian tujuan nasional, misalnya krisis ekonomi, gangguan separatisme, dan gangguan bersenjata. Kemudian, keamanan nasional juga bisa dilihat dari aspek perspektif *interest-based national security* yaitu kepentingan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan nasional tersebut, misalnya mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, melindungi demokrasi dan pluralisme, dan sebagainya. Pandangan kedua ini lebih bersifat mendasar dan jangka panjang. Tetapi sulit untuk dipisahkan kedua pandangan tersebut<sup>75</sup>.

Kasus penembakan misterius dapat dikategorikan sebagai langkah ABRI melalui perspektif aspek *threat-based national security*. Cara pandang ini didasari pada solusi untuk mengamankan kondisi secara nasional dibutuhkan terapi dalam mengatasi kemungkinan ancaman-acaman yang terjadi. Pembahasan sebelumnya, bahwa Presiden Soeharto telah mengakui bahwa penembakan mendadak yang dilakukan ABRI, membiarkan mayat-mayat korban petrus berada di lokasi yang terlihat, dan melakukan penekanan-penekanan kepada mereka yang dianggap

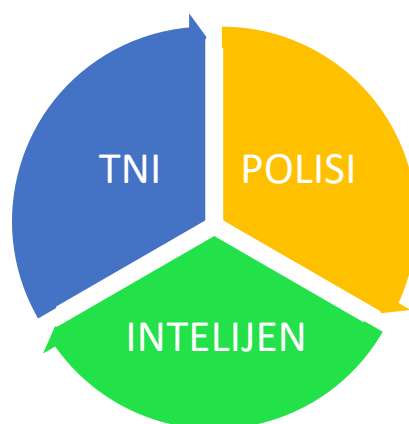
---

<sup>75</sup> Edy Prasetyono. 2008. Sistem Keamanan Nasional Indonesia : Aktor, Regulasi dan Mekanisme Koordinasi. Jakarta : Pasivis Universitas Indonesia. Hal, 152-153.

sebagai komplotan preman merupakan sebuah syok terapi untuk masyarakat. Ini dilakukan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak membuat onar kembali. Sebab perlakuan yang dilakukan oleh preman-preman dianggap oleh negara sebagai ancaman bagi keamanan masyarakat.

Selain itu, negara yang memiliki populasi yang besar juga berdampak pada ekonomi, dengan kemungkinan dapat memproduksi kekayaan bagi negara yang juga merupakan unsur penting dalam membangun kemampuan militer sebuah negara. Negara juga harus memiliki sumber ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militernya. Karena perkembangan *latent power* tersebut, fungsi-fungsi TNI dan Kepolisian di Indonesia pada masa orde baru tidak pada posisi untuk fokus menjaga keamanan. Tetapi, berperan serta dalam politik pemerintahan.

Gambar 4.7 Arsiran Hubungan ABRI Pada Orde Baru



Pada bab sebelumnya, penulis telah menggambarkan arsiran hubungan TNI, POLISI dan Intelijen yang ada pada lingkaran kinerjanya masing-masing, namun tetap berada pada koordinasi. Akan tetapi, pada masa orde baru TNI, POLISI dan Intelijen berada pada satu koordinasi yakni ABRI. Hal ini yang menyebabkan

keamanan negara Indonesia sering berkonflik. Kinerja aparaturnya penegak keamanan tidak bekerja secara maksimal. Dengan demikian, kepolisian pada masa orde baru tidak terlalu berperan dalam menyelesaikan kasus kriminalitas. Hal tersebut pula sesuai fakta yang penulis ungkap pada bahasan sebelumnya pada tabel yang menunjukkan peran kepolisian dalam menangani kasus kriminal pada periode tahun 1982-1985. Menurut penulis peran kepolisian tidak kalah penting untuk menjaga keamanan nasional, namun pengaruh TNI terlalu kuat untuk menjalankan sebuah rezim.

Berbagai kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat sipil yang mengarah pada pelanggaran HAM dikaitkan atau setidaknya dipercaya berkaitan dengan kerja-kerja intelijen pada kasus penembakan misterius yang dikenal luas oleh kalangan masyarakat sebagai kebijakan pemerintah untuk mengamankan orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Presiden Soeharto menyebut cara ini sebagai *shock therapy*. Eksekusi melalui operasi-operasi tertutup berjalan tanpa bisa dihentikan.

Kebijakan pemerintah yang kerap memberi alasan pembenaar bagi penembakan misterius berlalu tanpa pengawasan dan kontrol yang efektif dari badan legislatif maupun yudisial<sup>76</sup>. Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus di beberapa negara yang berada pada masa transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini sebab

---

<sup>76</sup> Sri Yanuarti. 2017. Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM. Jurnal Penelitian Politik : Volume 14, No.2 Desember 2017, halaman 127-144.

institusi-institusi intelijen pada rezim otoriter berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Ada beberapa dampak yang terjadi diantaranya :

1. Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan.
2. Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu.
3. Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik atau partai politik yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Dengan demikian, kinerja Intelijen pada masa Orba tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Aparatur keamanan hanya tunduk pada pimpinan rezim, sehingga kekuatan hanya bertumpu pada satu orang pemimpin, sementara pimpinan lembaga negara hanya kaki tangan untuk melanggengkan rezim.

#### **F. Intelijen di Indonesia Masa Orde Baru**

Selain angkatan bersenjata dan polisi, badan intelijen merupakan pilar ketiga dari aparat keamanan Indonesia. Dibawah Suharto, fungsi intelijen berada di sejumlah besar organisasi, yang paling penting adalah Intelijen Strategis Badan, Badan Intelijen Strategis (BAIS), bertanggung jawab untuk militer dan intelijen asing (melalui kontrolnya terhadap atase pertahanan Indonesia), dan Badan Koordinasi Intelijen Negara, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), mendesain ulang badan intelijen negara, Badan Intelijen Negara (BIN), setelah jatuhnya Suharto. Selain itu, setiap Kodam tentara memiliki staf intelijen yang melapor melalui Asisten Intelijen kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan

kemudian Komandan Angkatan Bersenjata. Pada tahun-tahun terakhir Suharto, personel BAIS dan BAKIN juga memiliki staf Badan Koordinasi Dukungan untuk Stabilitas Nasional Pembangunan (Bakorstanas), dipimpin oleh komandan angkatan bersenjata, yang melacak setiap ancaman politik terhadap rezim. Setelah kejatuhan Soeharto, Bakorstanas dibubarkan (meskipun staf tetap di agen rumah mereka) dan garis otoritas di komunitas intelijen, yang dalam rezim Orde Baru Soeharto berkumpul di pribadi presiden, dilemparkan ke dalam kekacauan. Sebagai hari ini, Indonesia tidak memiliki mekanisme koordinasi untuk badan intelijennya. Sementara BAIS melapor ke markas besar TNI, BIN melaporkan langsung ke presiden. Polisi, setelah berpisah dari angkatan bersenjata Pasukan, juga melaporkan langsung ke presiden<sup>77</sup>.

Dalam struktur ini, intelijen BAIS dapat diteruskan ke presiden oleh komandan angkatan bersenjata atas kebijakannya dan kecerdasan BIN dapat diteruskan ke Departemen (Kementerian) Pertahanan oleh presiden, paling tidak dalam teori. BAIS, badan intelijen militer, telah menjadi bagian yang meluas struktur kekuasaan di bawah Suharto. Itu memeriksa kesetiaan politik semua orang pejabat pemerintah dan menggunakan otoritas vertikal yang luas melalui TNI, secara rutin melewati rantai komando operasional dan administrasi. BAIS mencapai puncak pengaruhnya pada akhir 1980-an di bawah arahan militer yang kuat pemimpin Leonardus "Benny" Moerdani.<sup>2</sup> Untuk periode setelah Moerdani Saat jatuh, panglima angkatan bersenjata (Panglima) dibenci dua kali sebagai direktur BAIS. Dalam serangan balik terhadap institusi era Soeharto itu mengikuti

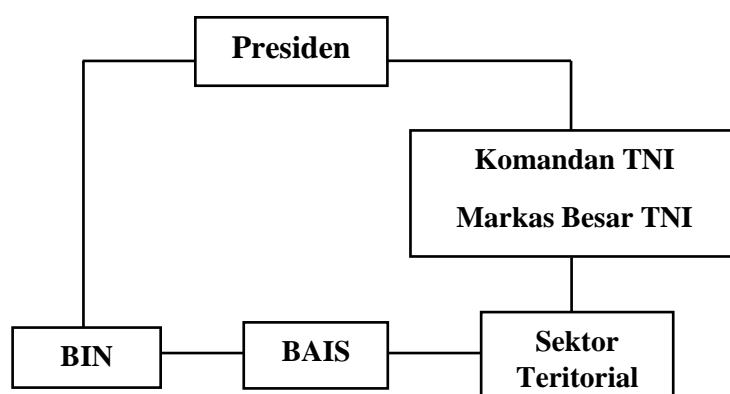
---

<sup>77</sup> Angel Rabasa and John Haseman. 2002. The military and democracy in Indonesia : challenges, politics, and power. Smith Richardson Foundation. Hal, 30.

akhir Orde Baru, badan itu ditempatkan di bawah Kepala staf TNI untuk urusan umum, dan seorang perwira tidak bersenjata, Angkatan Udara Wakil Marsekal Ian Santoso Perdanakusumah, ditunjuk sebagai wakilnya.

Dalam organisasi saat ini, BAIS diatur menjadi tujuh direktorat, termasuk (1) Internal (Direktorat A); (2) Asing (Direktorat B); (3) Pertahanan (Direktorat C); (4) Keamanan (Direktorat D); (5) Operasi Psikologis (Direktorat E); (6) Penganggaran dan Administrasi (Direktorat F); dan (7) Produksi Intelijen (Direktorat G). Itu direktorat terakhir menyiapkan produk intelijen untuk angkatan bersenjata komandan pasukan. BAIS tidak memiliki peran operasional. Fungsinya adalah koleksi dan analisis. Sumber intelijen domestik BAIS adalah unit independen yang mengumpulkan informasi di lapangan dan melapor langsung ke Markas BAIS dan unit intelijen yang merupakan bagian organik dari struktur komando teritorial. Semua laporan intelijen militer berkumpul di puncak hierarki militer, angkatan bersenjata komandan.

Gambar 4.8 Struktur Komunitas Intelijen Indonesia





BIN melakukan operasi intelijen (dengan dukungan dari personel intelijen TNI) dan tugas pengumpulan dan analisis. Kepala BIN juga adalah kepala penasihat intelijen presiden. Organisasi memiliki jaringan intelijen domestik dan asingnya sendiri, dan mengumpulkan dan laporan politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologis, keamanan, dan masalah pertahanan termasuk, tentu saja, masalah internasional dan terorisme dan subversi domestik. Tidak ada hubungan langsung antara kedua lembaga, meskipun petugas BAIS dan BIN bertemu secara berkala di tingkat staf dan menjaga hubungan pribadi informal yang begitu penting dalam konteks Indonesia. Kegagalan intelijen Indonesia dalam mendeteksi tindakan kekerasan atau mengidentifikasi sumber-sumber mereka, dan kecurigaan bahwa dinas intelijen mengejar agenda mereka sendiri, memperjelas kebutuhan untuk memperbaiki struktur dan meningkatkan kontrol pemerintah pusat terhadap agensi<sup>78</sup>.

Pada saat kejadian penembakan misterius tahun 1982-1985 penulis mengungkapkan pada pembahasan sebelumnya bahwa intelijen saat itu lemah. Sebagai bagian dari ABRI, seharusnya intelijen dapat memberi kekuatan untuk keamanan dan ketahanan pemerintah. Akan tetapi, pada saat itu intelijen di Indonesia lemah akibat pola rekrutmen ABRI yang tidak jelas dan sesuai dengan kapabilitas.

### **G. Fakta Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985**

Penembakan misterius bukan hanya menjadi sebuah kejadian yang luar biasa untuk kasus hak asasi manusia. Tetapi, sebuah kesan yang mendalam untuk

---

<sup>78</sup> *Angel and John*, Ibid. Hal, 31-32.

bangsa Indonesia mengenang fakta sejarah. Pada kasus tersebut, ternyata Konmas Hak Asasi Manusia mencatat beberapa fakta diantaranya :

#### 1. Pembunuhan

Didalam Peristiwa Penembakan Misterius, menurut Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan HAM Berat: Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, diduga terjadi salah satu pelanggaran HAM yang berat yaitu pembunuhan. Bentuk ini diatur dalam Pasal 7 huruf b juncto Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Fakta tersebut memaparkan serangan yang terjadi 1982-1985 terhadap penduduk sipil yang di nyatakan sebagai pengganggu keamanan di Yogyakarta, Medan, Palembang, Solo, Mojokerto, Semarang, Purwodadi, Malang, Cilacap, Magelang, dan Jakarta. Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang dapat di identifikasi sebagai aparat militer dan kepolisian setempat, misalnya Garnisun Yogyakarta dan Kodim 0734 / Yogyakarta, Laksus di Medan, Polsek Ngampilan – DI Yogyakarta, Polres Semarang CPM Palembang, Polres Palembang, Koramil Jebres – Solo, Polsek Banjarsari, Polsek Muspiya – Magelang, Polresta Magelang Utara, Polsek Jatiredjo – Mojokerto, Kodim 0833 Malang, Polda Metro Jaya.

Korban jiwa dalam peristiwa Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 tidak dapat dinyatakan secara detail. Karena tidak ada penghitungan secara resmi dan sah. Ada beragam penyebutan jumlah korban: Menteri Luar Negeri Belanda pada tahun 1984 Hans van den Broek menyebutkan jumlah korban Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 adalah 3.000 orang, sementara Mulyana W.

Kusumah (Kriminolog) menyebutkan bahwa korbanya sebanyak 2.000 orang. Sementara itu ada sumber lain yang memerinci korban petrus di Sumatera Utara 300 orang, Bandung 120 orang, Jateng 70 orang, Yogyakarta 60 orang, dan Jakarta sebanyak 55 orang. Fakta pembunuhan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Diambil oleh tentara atau polisi (terkadang dengan menggunakan teman untuk menjemput korban).

Empat puluh empat orang saksi menyatakan antara lain bahwa korban di jemput paksa oleh orang berseragam loreng hijau dengan ciri orang dan karakter yang kekar diduga sebagai tentara/polisi. Sebagian korban dijemput dari rumahnya dan sebagian yang lain diambil saat berada di jalan. Orang yang menjemput paksa korban terkadang di rumahnya dan sebagian di jalan. Orang yang menjemput paksa korban ada yang menggunakan topeng dan cadar untuk menutupi wajah dan identitasnya. Beberapa diantaranya menggunakan mobil Toyota Harddrop hitam. Didapatkan pula dari keterangan para saksi, beberapa diantaranya melakukan penjemputan atau pengambilan para korban dengan membawa senjata api.

- b. Diambil / dieksekusi oleh orang yang tidak dikenal

Delapan orang saksi menyatakan bahwa korban diambil oleh orang yang tidak mereka kenal sebelumnya dan kemudian ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat. Beberapa saksi yang lain menyatakan bahwa mayat korban di masukkan kedalam karung dan kemudian ditemukan di pinggir jalan atau tempat

tertentu, sementara saksi yang lain menyatakan bahwa kematian korban dikatakan oleh petugas kepolisian yang kemudian memnita keluarga korban ke rumah sakit tertentu untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah yang di temukan.

c. Diambil dari tempat umum

Dua orang saksi menyatakan bahwa korban diambil dari tempat umum dengan disaksikan oleh banyak orang. Ada yang diambil bermain *bilyard*, sementara saksi yang lain menyatakan bahwa korban diambil pada saat sedang mengikuti arisan kusir andong yang disertai permainan judi.

d. Tidak diketahui proses pembunuhannya

Proses pembunuhan korban petrus seringkali tidak diketahui. Sebelas orang saksi menyatakan bahwa telah melihat mayat korban petrus di pinggir jalan atau dipinggir sungai. Namun tak mengetahui bagaimana proses membunuhnya. Sebagaian mayat yang ditemukan itu dimasukkan kedalam karung dengan jempol yang diikat seutas tali. Pada umumnya mayat yang ditemukan tersebut terdapat luka tembak atau luka oleh senjata tajam. Seorang saksi pendeta bahwa menyatakan telah menemukan mayat di depan karung yang ditemukan di rumahnya.

Seorang saksi petugas *medic forensic* menjelaskan sekitar 1982-1985 menjadi bagian dari pemeriksa mayat-mayat. Yang mempunyai luka tembak yang mempunyai lebih dari satu pola yaitu ada luka tembak di bagian samping kanan yang tembus samping kiri dan di tengkuk.

## 2. Perampasan Kemerdekaan

Dari hasil penyelidikan Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 ditemukan fakta tentang terjadinya pidana perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Bentuk lain dari perampasan ini adalah penangkapan tidak disertai dengan surat perintah penangkapan pada Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 dilakukan secara berikut :

- a) Korban diambil dari tempat tinggalnya tanpa alasan apapun oleh orang yang tidak jelas identitasnya (biasanya korban dibawa dengan mobil)
- b) Korban diambil dari rumahnya oleh polisi tanpa alasan yang jelas
- c) Korban diambil oleh tentara
- d) Korban diambil dari tempat umum dan ditahan

## 3. Penyiksaan.

Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 juga terdapat penyiksaan yang dilakukan secara berikut:

- a) Mayat korban yang ditemukan terdapat ada bekas jeratan di lehernya.
- b) Alat kelamin korban oleh orang yang mengambilnya
- c) Mayat korban yang ditemukan dengan bekas luka jeratan dileher dan kedua telapak tangan korban gosong
- d) Pada mayat korban terdapat biru di dahi dan di pipinya

- e) Salah seorang saksi korban yang selamat memberikan kesaksian bahwa pada saat dijemput dirumahnya, saksi di pukuli dengan menggunakan rotan di bagian punggungnya.
- f) Saksi korban yang selamat lainnya memberikan kesaksian bahwa saat dia berada ditahanan Satgas Intel, para tahanan di pukuli oleh petugas dengan pemeriksaan. Bentuk penyiksaan lainnya adalah dengan di jemur dengan hanya menggunakan celana dalam di atas semen di lantai dasar menghadap matahari dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang, atau di rendam sambil duduk di dalam bak yang berisi air setinggi hidung dan diatas kepala tahanan dipasang kayu yang di beri paku agar tahanan tidak berdiri.
- g) Mayat korban yang ditemukan terdapat luka lebar dibagian belakang kepala dan luka tembak di bagian depannya.
- h) Mayat korban yang ditemukan dalam keadaan telanjang, badan penuh pasir, pipi kiri kanan penuh luka-luka gores seperti tergores aspal, dileher ada lingkaran menghitam seperti bekas di setrum. Kaki kanan dan kiri ada lubang-lubang kecil seperti ditusuk dengan benda kecil misalnya jari-jari sepeda, kemaluan diikat dengan tali.

#### 4. Penghilangan orang secara paksa

Pada Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 juga terdapat penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara berikut:

- a) Dijemput orang yang tidak dikenal dari rumah korban
- b) Dijemput dan dijebak oleh teman korban

- c) Diambil dari rumahnya oleh tentara
- d) Diambil dari jalan dan tempat umum oleh tentara/polisi

Tim Penyelidikan Pro Yustisia yang dibentuk Komnas HAM berhasil menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan ada pelanggaran HAM berat pada peristiwa penembakan misterius atau biasa dikenal dengan istilah ‘Petrus’ pada tahun 1982–1985. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, para pelaku Petrus adalah terdiri dari aparat militer dan sipil. Aparat militer seperti Koramil, Kodim, Kodam/Laksusda dan Garnizun. Mereka adalah pelaku yang melaksanakan perintah jabatan di bawah koordinasi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Republik Indonesia (Pangkopkamtib). Lembaga tersebut menurut Ketua Tim Penyelidikan, Yosep Adi Prasetyo, berada di bawah komando dan pengendalian presiden. Sedangkan aparat sipil yang patut diduga terlibat, menurut pria yang akrab disapa Stanley itu adalah Ketua RT, RW dan Lurah. Salah satu bentuk keterlibatan aparat sipil yaitu memberikan daftar nama target kepada aparat militer.

*Stanley* menuturkan, bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam kasus Petrus ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Terbukti dengan adanya serangan yang dilakukan aparat keamanan kepada penduduk sipil secara meluas, ke berbagai tempat seperti Yogyakarta, Bantul, Solo, Jakarta, Palembang, Medan dan lainnya. Menurut Stanley, korban penembakan misterius ini terdiri dari dua kelompok. Pertama mereka yang dikategorikan sebagai preman atau mantan

residivis. Kedua, adalah orang yang salah tangkap, bahkan petani yang menolak digusur tanahnya oleh pemerintah turut pula menjadi korban Petrus<sup>79</sup>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, penembakan misterius yang terjadi dari rentang waktu 1982 sampai 1985 termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa telah terpenuhi<sup>80</sup>.

## **H. Dalang Penembakan Misterius**

Kasus petrus hingga saat ini salah satu peristiwa yang susah di ungkap siapa dalang dibalik kejadian sadis tersebut. Para penegak hukum hingga penegak hak asasi manusia belum memiliki bukti yang kuat untuk melandasi otak dari peristiwa tersebut. Apabila pada satu sudut pandang negara yang bersalah dibawah pimpinan Soeharto, oleh sebab itu beliau yang harus bertanggungjawab. Akan tetapi, belum ditemukan bukti pasti bahwa petrus akibat dari perintah Presiden. Penegak HAM hanya bisa menggunakan bukti-bukti dari kejadian, seperti mayat yang dibiarkan tergeletak ditempat umum atau sumber dari saksi hidup petrus, misalnya dari preman yang berhasil lolos. Komisi Nasional

---

<sup>79</sup> Ady. 2012. Komnas HAM: Aparat Militer Pelaku Petrus 1982-1985 Aparat sipil juga patut diduga terlibat. (Online) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500ece0699e32/komnas-ham--aparaterpelaku-petrus-1982-1985/>. Diakses pada 15 September 2019 pukul 21.00 WIB.

<sup>80</sup> Aditya Revianur. 2012. Komnas HAM: Petrus Termasuk Pelanggaran HAM Berat. (Online) <https://nasional.kompas.com/read/2012/07/24/1846330/komnas.ham.petrus.termasuk.pelanggaran.ham.berat>. Diakses pada 12 September 2019 pukul 21.00 WIB.



Perlindungan Hak Asasi di Indonesia baru saja sampai pada tahap menentukan bahwa kejadian petrus merupakan kejadian yang melanggar HAM berat.

Seorang bernama Ariel Heryanto menulis tentang tema militer pada zaman Orde Baru 1966-1998. Judul bukunya menarik yakni *State Terrorism and Political Identity in Indonesia : Fatally Belonging*. Pada buku tersebut Heryanto membahas tentang keterlibatan militer dalam beberapa kasus-kasus di Indonesia yang berat, ia juga membangun teori baru tentang terorisme negara, Heryanto menegaskan bahwa sebuah rezim simulakral dan terorisme negara tidak bekerja dengan cara yang pasti. Meminjam kata-kata dari *Coronil Fernando* dan *Julie Skurski* yang bekerja pada kekerasan politik di Venezuela, dia menulis bahwa momen kekerasan politik ‘dibentuk oleh masing-masing masyarakat tertentu sejarah dan mitos identitas kolektif dan diberi energi oleh ingatan tentang ancaman terhadap kolektivitas<sup>81</sup>. Tidak mudah bagi Heryanto untuk menjelaskan hal itu, oleh sebab itu dia berhati-hati untuk membahas karakter kontingen terorisme negara di Indonesia: ‘terorisme negara adalah negara yang dinamis menjadi, atau, lebih baik, dari hubungan sosial. Efeknya mengintimidasi dan kemandirian politik berfluktuasi dan menyebar tidak merata di berbagai ruang sosial<sup>82</sup>. Untuk menjelaskan tentang negara terlibat sebagai peneror, dia menjelaskan menggunakan model analisis berosilasi antara ‘struktur subjek-umum, empiris-abstrak, teori naratif<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Ariel Heryanto. 2006. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia : Fatally Belonging*. New York and London : Routledge Taylor and Francis Groups. Hal, 8.

<sup>82</sup> Heryanto, Ibid. Hal, 23.

<sup>83</sup> Heryanto, Ibid. Hal, 160.

Sejalan dengan pendapat Heryanto pada saat pemerintah dan ABRI dalam rezim Orde Baru tidak sedikit pun meninggalkan jejak pendapat atau bukti perintah yang sah untuk kejadian tersebut. Sampai saat ini, pemerintah era Jokowi belum berhasil mengungkap siapa yang patut dijadikan dalang dari kejadian tersebut. Meskipun, tidak ada bukti nyata yang dapat mengarahkan bahwa Soeharto sebagai pelaku utama, penulis menemukan pernyataan tersirat dari Presiden Soeharto tahun 1982 ketika pidato rutin tahunan. Isi pidato Soeharto tersebut sebagai berikut :

“..... Saudara-saudara yang terhormat,

Seperti saya telah singgung di muka keadaan stabilitas keamanan kita selama ini cukup mantap. Bahkan telah melampaui dengan selamat situasi yang peka dan rawan, seperti dalam masa kampanye dan pelaksanaan Pemilu yang lalu.

Hal ini terutama berkat kewaspadaan dan kesadaran masyarakat yang tidak mudah terseret pada gelombang gerakan dan isu-isu yang tidak bertanggungjawab dan juga kewaspadaan dan kesigapan bertindak oleh alat-alat negara – ABRI – yang selalu siap siaga untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat<sup>84</sup>.”

Menurut penggalan kalimat pada pidato Soeharto tersebut penulis meyakini bahwa pemerintah Orde Baru memang telah siap untuk menentukan solusi dalam menangani setiap masalah keamanan yang terjadi, terutama tingkat kriminalitas yang disebabkan oleh preman. Selanjutnya pidato Presiden Soeharto berlanjut seperti berikut :

“sementara itu kita masih harus memberikan perhatian yang lebih serius untuk membrantas secara tuntas pada pelaku kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan kekejaman yang akhir-akhir ini terjadi seperti perampokan, pembajakan bis dan sebagainya. Saya minta agar seluruh jajaran ABRI, khususnya POLRI sebagai alat penegak hukum, dapat mengatasi gangguan yang meresahkan masyarakat itu.”

---

<sup>84</sup> Suharto. 1985. *Amanat Kenegaraan IV*. Jakarta: Idayu Press. Hal. 27

Isyarat Presiden Soeharto dalam pidato tersebut mengarahkan jajaran ABRI untuk mengatasi konflik keamanan di masyarakat pada tahun kurun waktu 1981 hingga 1982. Kejahatan dan kekejaman yang dimaksud Presiden Soeharto mengarah pada rentetan kejadian yang dilakukan oleh preman-preman saat itu. Seperti pada kisah yang telah penulis ungkap tentang komplotan Bathi Mulyono, sebagai salah satu contohnya.

Isi pidato presiden tersebut penulis gunakan sebagai alat bukti bahwa petinggi-petinggi pemerintah atau ABRI pada rezim Orde Baru bertanggungjawab atas kejadian petrus. Perlu kajian secara hukum yang kuat untuk menetapkan bahwa petrus melanggar hak manusia. Pemerintah era Jokowi sepertinya belum memprioritaskan kejadian petrus diusut kembali. Semua elit politik di negeri ini seperti memaklumi kejadian tersebut, sebagai bentuk solusi negara dalam menangani keamanan.

“Wiranto mengklaim kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu susah untuk dibawa ke pengadilan karena buktinya minim. Dia mencontohkan salah satunya ialah kasus penembakan misterius (petrus).<sup>85</sup>”

Sulitnya kasus HAM petrus sebab melibatkan aparat negara. Era pemerintah Jokowi merasa kesulitan mengusut kasus tersebut, meskipun saksi hidup pelaku Petrus masih ada yang hidup, penulis yakini<sup>86</sup>. Saksi korban tidak dijadikan alat bukti yang sah untuk pemerintah menentukan dalang dibalik petrus, Bathi Mulyono dan Johny merupakan dua orang saksi korban petrus yang berhasil menyelamatkan diri.

---

<sup>85</sup> M. Ahsan Ridhoi. 5 September 2018. "Klaim Kasus HAM Masa Lalu Susah Diusut, Wiranto Contohkan Petrus". (Online) <https://tirto.id/cXgB>. Diakses pada 23September 14.23 WIB.

<sup>86</sup> Lihat <https://www.youtube.com/watch?v=s6X0HUiwP1M>.

"Enggak mungkin kami selesaikan kesalahan hukum, tapi kami justru melanggar hukum," kata Wiranto. Salah satu kasus yang dicontohkan Wiranto adalah penembakan misterius (petrus) pada zaman Orde Baru. Menurutnya, susah untuk menemukan bukti-bukti yang bisa menjadi dasar untuk membawa kasus yang terjadi pada kurun 1982-1985 itu ke pengadilan. "Yang memerintahkan sudah wafat, yang diperintahkan sudah mati, yang dibunuh sudah mati. Saya tanya ini cari saksinya bagaimana? Kami suruh menyelesaikan bagaimana," kata Wiranto<sup>87</sup>.

Kesaksian mereka tidak dianggap valid, negara perlu lebih banyak lagi bukti. Selain yang ditulis oleh *James T. Siegel* yang mengumpulkan berbagai bukti kejahatan petrus, lalu *Siegel* tulis hingga menjadi sebuah buku. Penelitian *David Bouchier* juga tidak membantu pemerintah dalam mengusut kasus tersebut.

---

<sup>87</sup> Selengkapnya <https://tirto.id/klaim-kasus-ham-masa-lalu-susah-diusut-wiranto-contohkan-petrus-cXgB>.

